



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
8. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan secara sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendampingan dan penanganan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
13. Operasi Tanggap Darurat adalah kegiatan-kegiatan dalam tanggap darurat yang dilakukan oleh sekelompok orang/Instansi/organisasi yang bekerja dalam kelompok/Tim Penyelenggaraan.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Penentuan kejadian adalah kejadian atau peristiwa yang ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang, yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

27. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
28. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengurangan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi merupakan pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
- (2) Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi bertujuan:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah untuk penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi; dan
 - d. sebagai Instrument koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan erupsi Gunung Merapi.

BAB II

SIFAT RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 3

Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi bersifat:

- a. partisipatoris yaitu penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi melibatkan semua pihak; dan
- b. dinamis yaitu Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 4

Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi diselenggarakan di wilayah:

- a. Kecamatan Srumbung;
- b. Kecamatan Dukun; dan
- c. Kecamatan Sawangan.

BAB IV

RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi merupakan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi.
- (2) Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun. Berlaku selama nya setiap 2 tahun di review.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang; dan
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO



EDI WASONO, S.H.

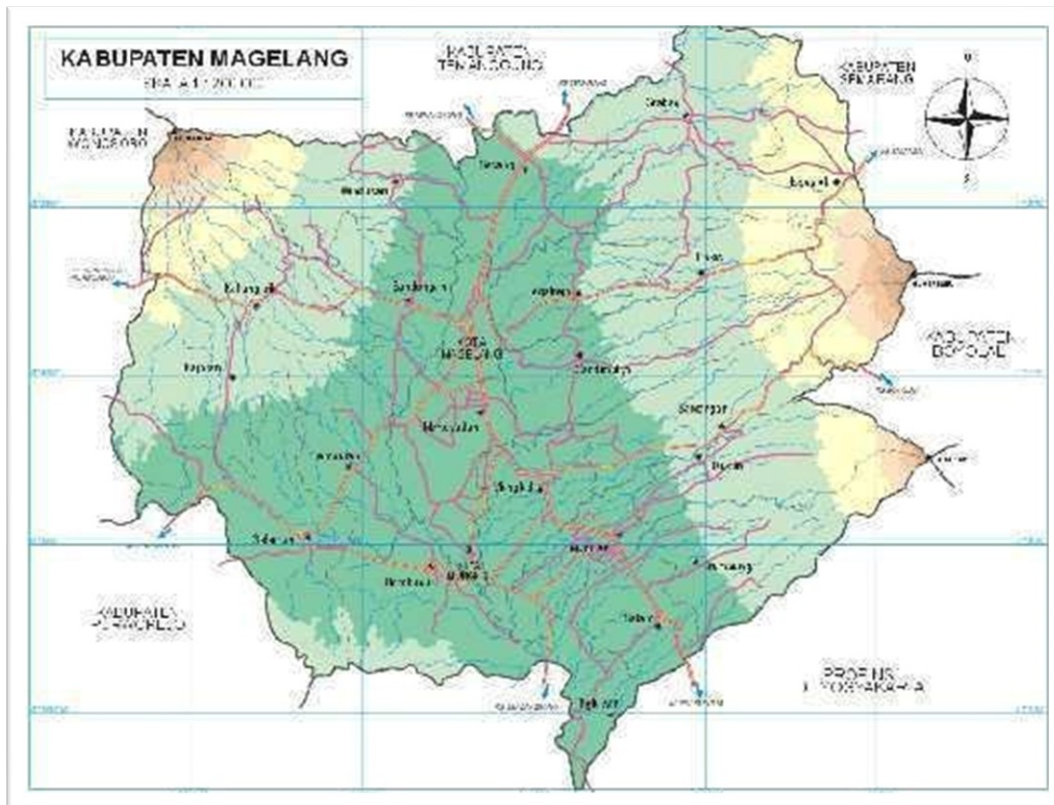
Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Magelang secara geografis terletak diantara $110^{\circ}01'51''$ dan $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur, $7^{\circ}19'33''$ dan $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan. Batas administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dan di tengah-tengah berbatasan dengan Kota Magelang. Luas Wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha (1.085,73 km²).



Gambar 1. Wilayah Kabupaten Magelang (Sumber : BAPPEDA)

Topografi Kabupaten Magelang yang merupakan daerah datar (1.628 Ha), bergelombang (59.175 Ha), curam (27.686 Ha) dan sangat curam (19.542 Ha), dengan ketinggian wilayah antara 203-1.378 m diatas permukaan laut, dan ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan air laut. Kondisi kecuraman lahan mengakibatkan Kabupaten Magelang berpotensi menjadi daerah rawan bencana tanah longsor.

Luas tanah menurut penggunaan Kabupaten Magelang pada tahun 2017 dibagi menjadi Lahan Sawah 36.681 Ha, Tegal Kebun 31.813 Ha, Perkebunan 2.317 Ha, Hutan Rakyat 5.609 Ha, Padang Penggembalaan/Rumput 2 Ha, Sementara Tidak Diusahakan 7 Ha, Lainnya (Kolam/Tebat/Empang/Hutan Negara dll) 9.746 Ha, Lahan Bukan Pertanian 22.398 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebanyak 1.246.839 jiwa yang terdiri dari 636.384 jiwa laki-laki dan 632.012 jiwa perempuan (Sumber : BPS Magelang Dalam Angka 2018).

Kabupaten Magelang merupakan daerah teritorial yang rawan bencana. Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Magelang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian lainnya.

Wilayah Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan terdiri atas 367 desa dan 5 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 1.246.839 jiwa yang terdiri dari 636.384 jiwa laki-laki dan 632.012 jiwa perempuan (*Sumber : BPS Magelang Dalam Angka 2018*). Sebagian besar berada pada kawasan rawan bencana baik yang berasal dari Erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, banjir di aliran sungai, angin lesus/puting beliung, kekeringan, kebakaran, wabah penyakit, gempa bumi dan lain-lain.

Penetapan KRB didasarkan pada sejarah erupsi gunung Merapi sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Erupsi gunung Merapi tahun 2010 menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua pihak terutama dalam memahami karakteristik erupsi gunung Merapi. Sejarah aktivitas Gunung Merapi memiliki fase dan siklus tahunan erupsi yang bisa dicermati dengan dukungan teknologi kegunungapian yang semakin mutakhir. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sangat membantu memahami karakteristik erupsi Gunung Merapi.

Secara geografis Gunung Merapi terletak di sebelah tenggara Kabupaten Magelang, dan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kawasan padat penduduk dengan mata pencaharian memanfaatkan sumber daya kawasan gunung Merapi dalam bidang pertanian, perkebunan dan industri termasuk eskplorasi produk vulkanik gunung Merapi berupa pasir, kerikil dan batu. Komoditas pertanian tanaman pangan, sayuran, tembakau dan buah-buahan terutama salak merupakan produk unggulan di kawasan ini.

Kawasan gunung Merapi memiliki cuaca yang sejuk dan udara yang segar dengan pemandangan alam yang sangat indah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencari kehidupan dan penghidupan di kawasan ini. Kondisi ini membangkitkan perekonomian masyarakat yang terus meningkat sepanjang waktu. Di satu sisi memberi kemanfaatan yang besar bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, tetapi di sisi lain kawasan ini merupakan kawasan dengan ancaman bencana erupsi Gunung Merapi sehingga diperlukan upaya pengelolaan sumber daya dengan sebaik-baiknya termasuk pengelolaan menghadapi risiko bencana erupsi Gunung Merapi.

Wilayah Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan, 367 desa, 5 Kelurahan. 3 kecamatan diantaranya masuk kawasan rawan bencana (KRB) III Erupsi Gunung Merapi, yaitu Kecamatan Srumbung (8 Desa), Kecamatan Dukun (10 Desa), dan Kecamatan Sawangan (3 Desa). Dari ketiga kecamatan tersebut ada sekitar 55.226 jiwa yang terancam erupsi merapi.

Oleh karena itu dibutuhkan usaha-usaha pengurangan risiko bencana yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Upaya melakukan pengelolaan risiko bencana tersebut dijalankan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, yang bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan serta;
- dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mendasarkan pada mandat Perda Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, maka BPBD menyusun perencanaan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Sebuah perencanaan yang menggambarkan perkiraan kejadian dan dampak dari ancaman erupsi Gunung Merapi di masa mendatang serta usaha-usaha untuk melakukan pengurangan risiko bencana yang disebut sebagai perencanaan kontingensi.

Perencanaan ini disusun secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Perencanaan kontingensi ini memperhitungkan aspek kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Magelang serta kemampuan masyarakat di desa terdampak untuk melakukan penanganan darurat bencana erupsi gunung Merapi. Perencanaan menyeluruh yang menyeimbangkan berbagai isu penting ini dituangkan dalam sebuah Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang tahun 2017-2020.

B. Potensi Kejadian Bencana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, pengertian ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Definisi yang lain, ancaman merupakan gejala, peristiwa dan kejadian, atau kegiatan manusia yang berpotensi menyebabkan kematian, luka-luka, kecacatan pada manusia, kerusakan harta benda, kehidupan sosial dan kerusakan lingkungan. Ancaman bencana erupsi Gunung Merapi berupa letusan material vulkanik yang terdiri dari aliran piroklastik, hingga ancaman banjir lahar hujan. Dengan intensitas dan kuantitas yang berbeda-beda, material vulkanik tersebut membahayakan jiwa manusia dan seluruh kawasan yang terkena baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini data sejarah aktivitas gunung Merapi yang berdampak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Tabel 1. Aktivitas Vulkanik Erupsi Gunung Merapi

NO	TAHUN	PERISTIWA
1	1930	Erupsi yang menghancurkan 13 desa, menewaskan 1.400 jiwa
2	1994	Erupsi yang menewaskan puluhan jiwa dan menghancurkan beberapa desa
3	1998	Terjadi erupsi vertikal dan tidak terjadi korban
4	2001-2003	Peningkatan aktivitas dengan periode yang lama
5	2006	Peningkatan aktivitas disertai dengan beberapa kali luncuran awan panas
6	2010	Peningkatan aktivitas disertai letusan eksplosif dengan luncuran awan panas yang menghancurkan beberapa desa serta menewaskan 277 jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Tabel 2. Sejarah Erupsi Gunung Merapi

Tahun Kegiatan	Lamanya Kegiatan (tahun)	Masa Istirahat/ Lama Istirahat (tahun)	Waktu Letusan Puncak	Keterangan
1871-1872 (*)	1	1872-1878/6	15	April 1872
1878-1879	1	1878-1881/3	Dalam tahun 1879	
1882-1885	3	1885-1886/1	Januari 1883	
1886-1888	3	1888-1890/2	Dalam tahun 1885	
1890-1891	1	1891-1892/1	Agustus 1891	
1892-1894	2	1894-1898/4	Oktober 1894	

Tahun Kegiatan	Lamanya Kegiatan (tahun)	Masa Istirahat/ Lama Istirahat (tahun)	Waktu Letusan Puncak	Keterangan
1898-1899	1	1899-1900/1	Dalam tahun 1898	
1900-1907	7	1907-1908/1	Terjadi tiap tahun	
1908-1913	5	1913-1914/1	Dalam tahun 1909	
1914-1915	1	1915-1917/2	Maret-Mei 1915	
1917-1918	1	1918-1920/2		
1920-1924 (*)	4	1924-1930/6	Februari, April 1922	
1930-1935 (*)	5	1935-1939/4	18	Des 1930, 1927
				Apr 1934
1939-1940	1	1940-1942/2	23	Des 1939, 1924
				Jan 1940
1942-1943	1	1943-1948/5	Juni 1942	
1948-1949	1	1949-1953/4	29	September 1948
1953-1954 (*)	1	1954-1956/2	18	Januari 1954
1956-1957	1	1957-1960/3	3 Januari 1953	
1960-1962	2	1962-1967/5	8 Mei 1961	
1967-1969 (*)	2	1969-1972/3	8 Januari 1969	
1972-1974	2	1974-1975/1	13	Desember 1972
1975-1985	10	1985-1986/7	15	Juni 1984
1986-1987	1	1986-1987/1	10	Oktober 1986
1992-1993	1	1987-1992/5	2 Februari 1992	
1993-1994	1	1993/5 bln	22	November 1994
1996-1997	1	1994-1996/2		Januari 1997
1998	1 bln	1997-1998/1		Juli 1998
2000-2001	1	1998-2000/2		10 Feb 2001
2010	2	2006-2010		26 Oktober 2010

Sumber: <http://www.vsi.esd m.g o.id/gunungapiIndonesia/merapi/sejarah.html>



Gambar 2 : Letusan tahun 2010 (Sumber : BPPTKG Yogyakarta)

Kategori ancaman/bahaya letusan erupsi Gunung Merapi terdiri atas:

1. Bahaya primer

Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung, antara lain:

- a. Guguran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuhnya kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat membakar dan merusak lingkungan yang terlanda.

- b. Awan panas (*Pyroclastic Flow*)

Awan panas bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan panas adalah aliran massa panas (300 – 600 derajat celcius) berupa campuran gas dan material gunung api yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.

2. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti :

- a. Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produkletusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunung api. Lahar Erupsi Gunung Merapi Menempati area 286 km² di sekitar Merapi dengan ketebalan endapan rata-rata 0,5-2 m, ekstrim 15 m (Ds. Sisir, K. Senowo, 1888), 10 m (Ds. Salam, 1931), 25 m (K. Blongkeng, 1837). Pemicu lahar adalah hujan, intensitas 40 mm selama 2 jam dengan kecepatan lahar rata-rata 5-7 m/dt (rata-rata 20km/jam) pada elevasi 1000 m.

- b. Hujan di sekitar Erupsi Gunung Merapi

Lereng barat 2416 mm/tahun, lereng selatan 3253 mm/tahun, terjadi pukul 12.00 WIB-19.00 WIB, sehingga 80% lahar terjadi sore hari. Hujan lokal/*stationary/orographic* 66% memicu lahar, hujan *regional/migratory* 33 % menyebabkan lahar dalam skala relatif besar. Lahar terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

3. Bahaya tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan).

C. Peraturan dan Kelembagaan Terkait Penanggulangan Bencana

Keselamatan dari ancaman erupsi Gunung Merapi merupakan hak dari setiap warga di Daerah yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik Pemerintah maupun non Pemerintah melalui tindakan-tindakan yang terencana, terukur, dan terkoordinasi dengan baik. Usaha membangun keselamatan tersebut salah satunya melalui penyusunan rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi. Penyusunan rencana kontingensi melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Hasil dari perencanaan ini dituangkan dalam sebuah dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi yang disepakati bersama oleh para pihak dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi meliputi:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pos Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman perencanaan penanggulangan bencana;
10. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang.

D. Arti Penting Penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi

1. Maksud

- a. memberikan pemahaman kesiapsiagaan menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. memberikan pemahaman teknis penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi bagi para pemangku kepentingan di Daerah; dan
- c. menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi merupakan tugas bersama para pemangku kepentingan di Daerah.

2. Tujuan

- a. terwujudnya kesiapsiagaan para pemangku kepentingan di Daerah dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi;

- b. terwujudnya sistem penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah; dan
 - c. terwujudnya komitmen dari para pemangku kepentingan di Daerah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal.
3. Sifat Rencana Kontingensi
- Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi bersifat:
- a. Partisipatoris yaitu penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi melibatkan semua pihak; dan
 - b. Dinamis yaitu Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
4. Ruang Lingkup
- Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi, merupakan dokumen daerah yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi dalam penanggulangan bencana Erupsi Gunung Merapi.
5. Tahapan Penyusunan Rencana Kontingensi
- Kegiatan penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Kerja Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi yang bertugas menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana kontingensi;
 - b. orientasi dalam rangka penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana Erupsi Gunung Merapi tentang pentingnya rencana kontingensi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta *updating*;
 - d. pengumpulan data dilakukan pada semua klaster penanganan bencana dan lintas administratif;
 - e. verifikasi data;
 - f. analisa data sumber daya dengan menyusun proyeksi kebutuhan dibanding dengan sumber daya yang tersedia;
 - g. penyusunan rancangan awal rencana kontingensi;
 - h. penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi yang disepakati;
 - i. konsultasi publik tentang hasil rumusan rencana kontingensi; dan
 - j. penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pemangku penanggulangan bencana.
6. Aktivasi Rencana Kontingensi
- Aktivasi Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dilaksanakan setelah terjadi tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana Erupsi Gunung Merapi dari hasil kajian lembaga teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada saat status "Siaga Merapi".

BAB II
PENILAIAN BAHAYA, PENENTUAN KEJADIAN DAN
PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN BENCANA

A. PENILAIAN BAHAYA

Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi mengacu pada beberapa hal yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah, bahwa gunung Merapi dikategorikan sebagai gunung aktif;
- b. Buku risiko bencana Indonesia tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang masuk dalam risiko sedang hingga tinggi ancaman bencana erupsi gunung Merapi;
- c. Dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-2018 bahwa Kabupaten Magelang termasuk kawasan rawan terhadap bahaya primer erupsi gunung Merapi;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Mgelang Tahun 2010-2030;
- e. Dokumen rencana strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang paling berbahaya yakni adanya ancaman letusan gunungapi Merapi;
- f. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bahaya letusan gunungapi Merapi.

Selain itu, penilaian bahaya didasarkan pada siklus pendek letusan Merapi dalam beberapa dekade terakhir rata-rata 4 tahun. Masa istirahat setelah letusan besar diperkirakan lebih panjang dari siklus pendek sebelumnya. Diperkirakan ancaman dalam beberapa dekade ke depan akan ke arah tenggara-selatan sesuai morfologi puncak. Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi dapat ditentukan dengan memperhatikan tipe letusan sebagai berikut:

- a. ekplosif jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu dan kerikil perkiraan luasa ancaman hujan abu mencapai puluhan kilometer dan lontaran batu dan kerikil sejauh < 3 Km,
- b. efusif pembentukan kubah lava, jenis ancaman yang ditimbulkan hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan surge. Awan panas akan meluncur sampai jarak 6 – 12 kilometer dari puncak.
- c. efusif/eksplosif jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu, kerikil, awan panas guguran danawan panas letusan. Ancaman yang ditimbulkan adalah luncuran awan panas hingga mencapai 17 kilometer dari puncak.

Penilaian bahaya mempertimbangkan kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3 Kriteria Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan Kawasan di luar KRB gunung Merapi

KRB	LOKASI KAWASAN	ARAHAN PERUNTUKAN
KRB III	Dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar)dan hujan abu lebat	Kawasan permukiman (<i>enclave</i>) di KRB III di luar Taman Nasional Gunung Merapi yang tidak terkena bencana erupsi, tidak dikembangkan (<i>zero growth</i>), dilakukan dengan pendekatan <i>living in harmony</i>

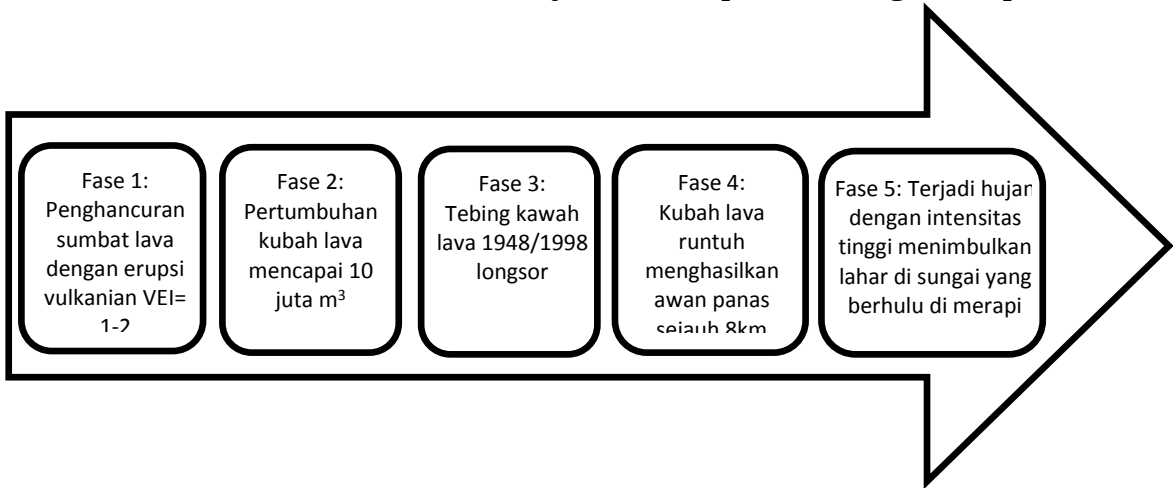
KRB	LOKASI KAWASAN	ARAHAN PERUNTUKAN
KRB II	Potensi Aliran Massa (awan panas, aliran lava, dan lahar) dan potensi Lontaran (material jatuhan, lontaran batu pijar)	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan permukiman dikembangkan secara terbatas/dikendalikan secara ketat• Masyarakat di kawasan ini diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunung berapi
KRB I	Kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir. Apabila hujan di puncak gunung Merapi membesar maka kawasan ini berpotensi tertimpa material berupa debu bercampur air (lumpur) yang berasal dari Gunung Merapi	Sempadan sungai merupakan kawasan lindung setempat yang lebar sempadan sungainya ditetapkan tiap segmen dengan memperhatikan bentuk/profil sungai (pemda mengusulkan dapat menetapkan sendiri lebar sempadan sungainya, namun demikian <u>perlu ditetapkan</u> lebar minimal sempadan sungai)
Kawasan diluar KRB	Kawasan lainnya, selain yang ditetapkan sebagai KRB	Arahan peruntukan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ rencana rinci tata ruang

B. PENENTUAN KEJADIAN

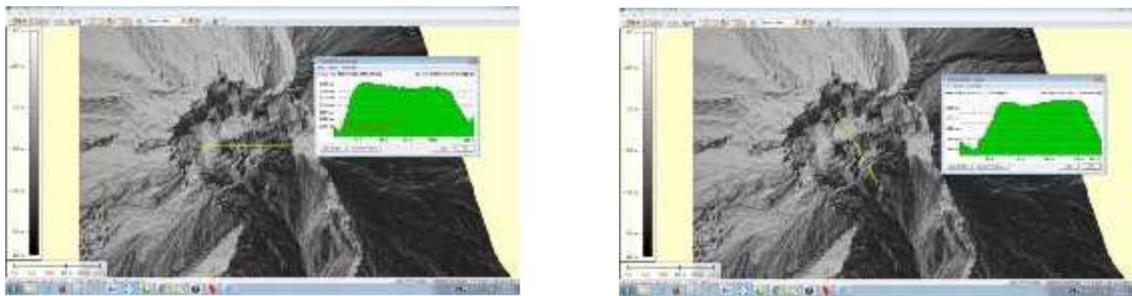
Penentuan kejadian ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) di Yogyakarta. Menurut perhitungan dan analisa para ahli dapat dijelaskan bahwa dengan mengacu pada pada erupsi Gunung Merapi 2010 dapat digambarkan fase-fase yang dialami Gunung Merapi sebagai berikut:

1. Pola umum mengikuti pola erupsi pasca letusan 1872 dengan tipe “Merapi”
2. Fase 1: Penghancuran sumbat lava dengan erupsi vulkanian VEI= 1-2 yang diawali dengan letusan cenderung eksplosif dengan ketinggian kurang lebih 1,5 km dan jatuhan material di seputar area puncak Merapi hingga radius 3 Km ke segala arah. Sementara abu vulkanik diperkirakan mengarah ke Barat dan ke Timur sesuai dengan pola hembusan angin
3. Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m³ yang merupakan pertanda letusan tipe “Merapi”
4. Fase 3: Tebing kawah lava 1948/1998 longsor sebagai akibat pembentukan kubah lava yang terus meningkat
5. Fase 4: Kubah lava runtuh menghasilkan awan panas sejauh 7 km diperkirakan meluncur ke beberapa arah yaitu tenggara (sedikit), selatan, barat daya hingga barat dengan konsentrasi di aliran sungai Gendol dan sungai Senowo. Awan panas jenis surge yang mengiringi awan panas utama di lereng Tenggara-Selatan dan Barat dapat melanda di sektor tersebut dalam radius 5 km perlu diantisipasi sebagai radius bahaya
6. Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar di sungai yang berhulu di Merapi sehingga perlu diwaspadai semua aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi.

Gambar 3 : Penentuan Kejadian Erupsi Gunung Merapi



Gambar 4 : Fase 1: Penghancuran sumbat lava melalui erupsi vulkanian VEI= 1-2

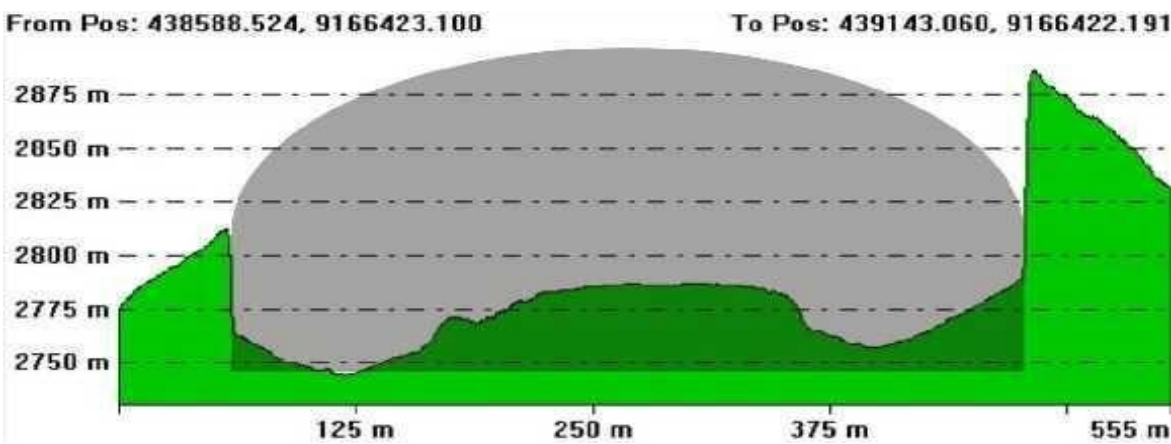


Volume kubah lava paska 2010 = 133 ribu m³



Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Gambar 5: Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m3

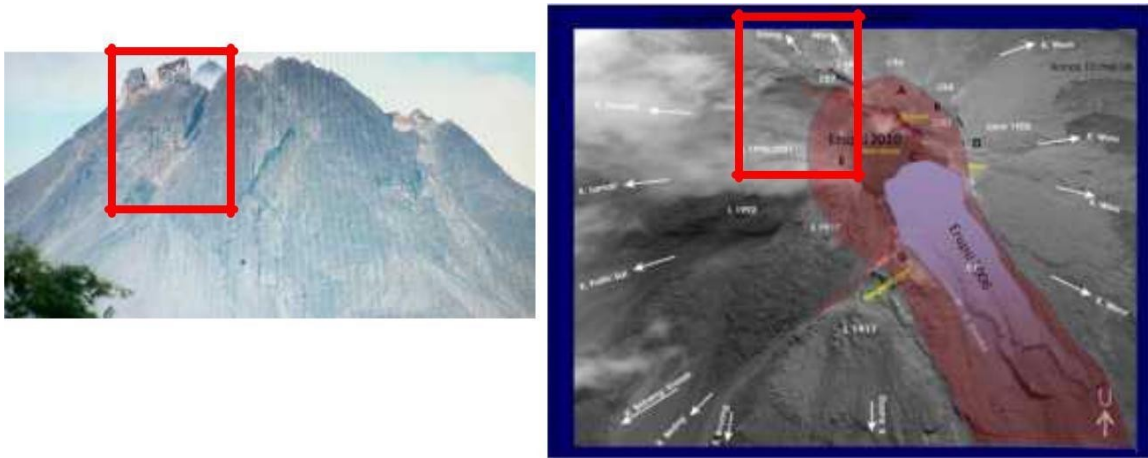


D1 = 487 m; D2 = 374 m; T = 100 m

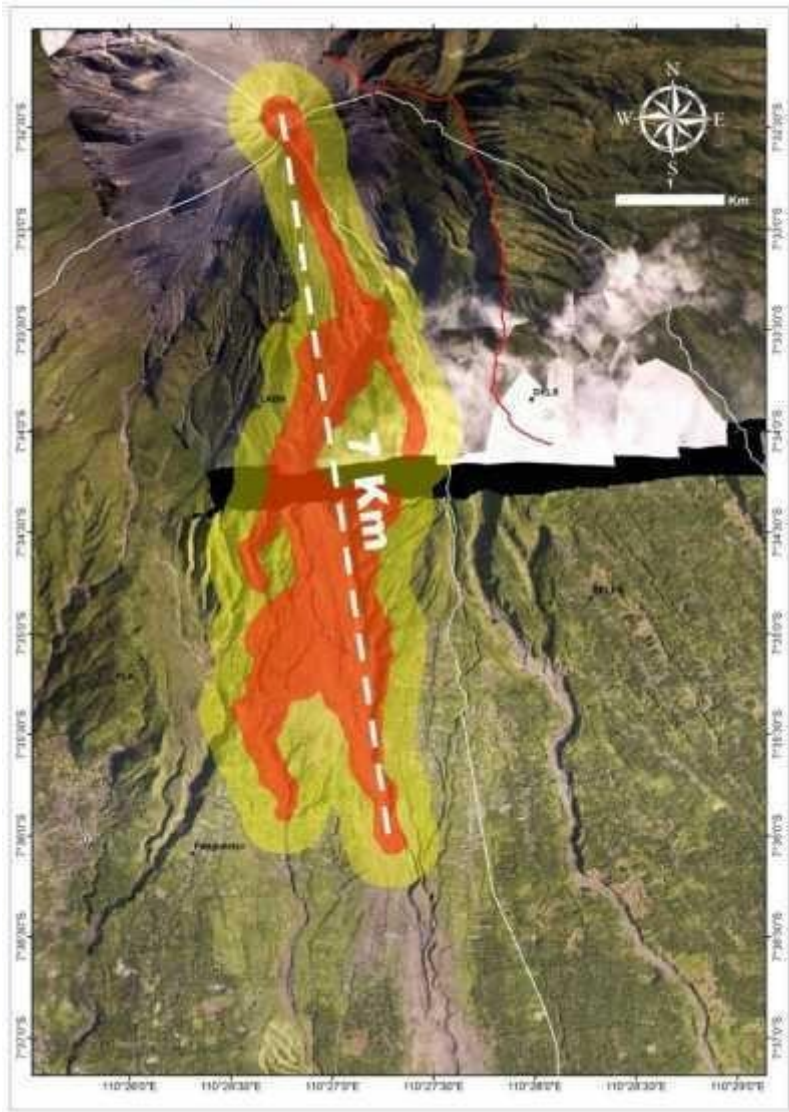
$V (0,5 \text{ ellipsoid}) = \frac{4}{24} * \phi * D1 * D2 * T = 9,5 == 10 \text{ juta m}^3$

Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Gambar 6 : Fase 3: Tebing kawah lava 1948, 1998 longsor

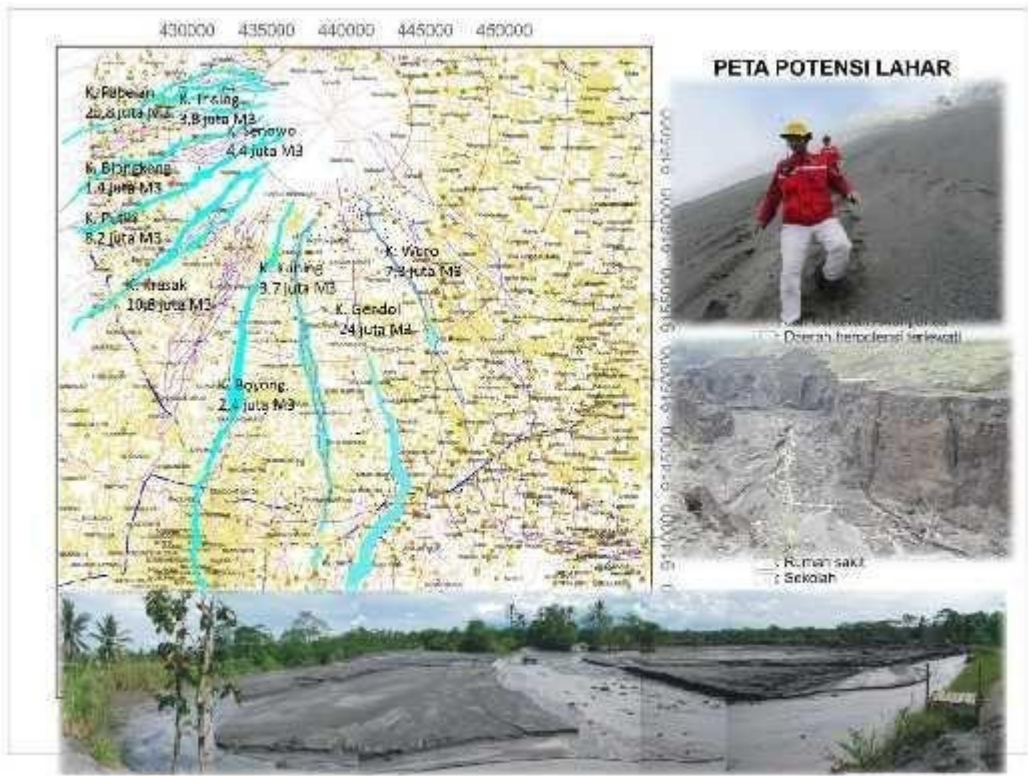


Gambar 7 : Fase 4: Kubah lava runtuh



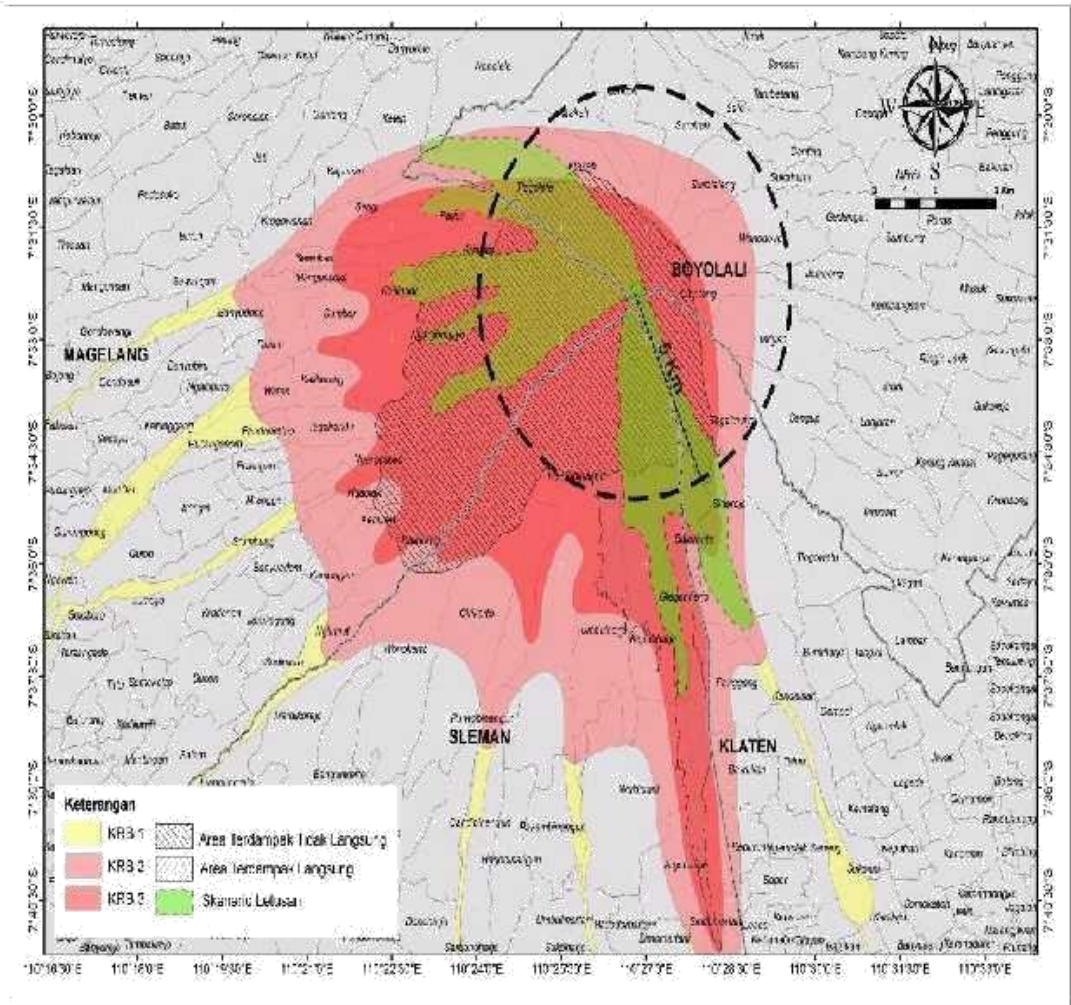
Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Gambar 8 : Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar



Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Gambar 9 : Peta skenario bahaya erupsi Merapi pasca letusan 2010



Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Keterangan peta :

- Material lontaran mencapai radius 2 Km dari Puncak
- Sebaran material Abu mengikuti arah angin saat terjadi letusan
- Awan panas surge menghempas dalam radius 5 km dari Tenggara ke Barat Laut
- Untuk daerah terdampak awan panas terlampir dalam peta:
 - a. Kali Apu (9 Km) : Desa Tlogolele, Klakah
 - b. Kali Trising (7.5 Km): Desa Sengi, Paten
 - c. Kali Senowo (8Km): Desa Krinjing, Keningar
 - d. Kali Lamat (7 Km): Desa Ngargomulyo
 - e. Kali Putih (7Km) : Desa Ngablak
 - f. Kali Woro (9 Km): Desa Balerante, Desa Sidorejo
 - g. Kali Gendol (9 Km): Desa Glagaharjo, Desa Kepuharjo

C. PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN BENCANA

Pengembangan skenario kejadian bencana didasarkan pada penilaian bahaya dan penentuan kejadian. Sehingga pengembangan skenario kejadian bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Erupsi Gunung Merapi terjadi pada masa musim penghujan sebagai berikut.
2. Jarak dari fase 1 (Penghancuran sumbat lava) menuju fase 2 (Pertumbuhan kubah lava) ditetapkan status WASPADA MERAPI dan berlangsung selama 1 bulan.
3. Jarak dari fase 2 (Pertumbuhan kubah lava) menuju fase 3 (Tebing kawah longsor) ditetapkan status SIAGA MERAPI dan berlangsung selama 2 minggu.
4. Jarak dari fase 3 (Tebing kawah longsor) menuju fase 4 (Kubah lava runtuh) ditetapkan status AWAS MERAPI dan berlangsung selama 1 minggu hingga terjadi erupsi.
5. Jarak dari fase 4 (Kubah lava runtuh) atau setelah terjadi erupsi menuju fase 5 (banjir lahar hujan) selama 1 minggu.

Adapun skenario evakuasi warga dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 4: Skenario evakuasi warga

	NORMAL (LEVEL I)	WASPADA (LEVEL II)	SIAGA (LEVEL III)	AWAS (LEVEL IV)
KRB I	Dapat melakukan kegiatan sehari-hari	Dapat melakukan kegiatan sehari-hari	Meningkatkan kewaspadaan	Menyiapkan diri untuk mengungsi
KRB II	Dapat melakukan kegiatan sehari-hari	Dapat melakukan kegiatan sehari-hari	Menyiapkan diri untuk mengungsi	Orang tua, orang catat, ibu hamil diungsikan
KRB III	Dapat melakukan kegiatan sehari-hari	Meningkatkan kewaspadaan	Orang tua, orang catat, ibu hamil diungsikan	Masyarakat sudah diungsikan

BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO DAN DAMPAK

1. SKENARIO KEJADIAN

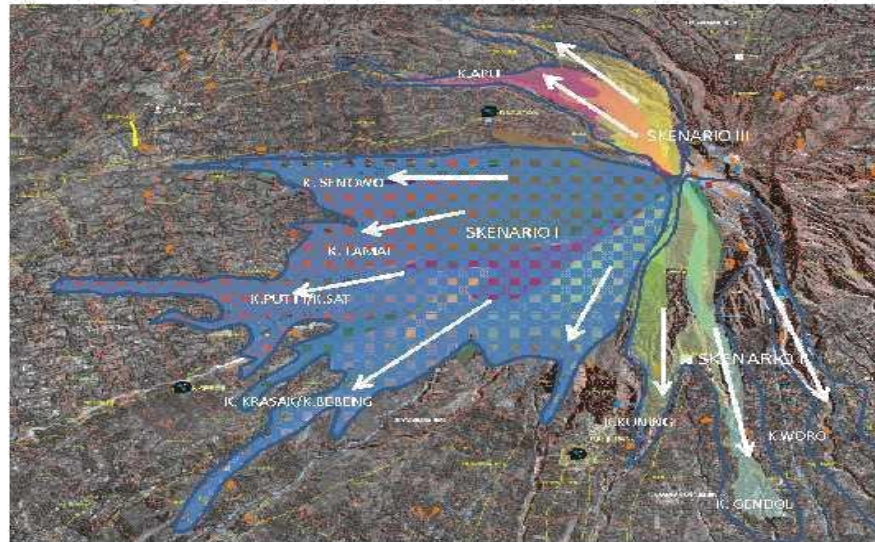
Melihat kejadian yang lalu, dalam Rencana Kontingensi ini Kabupaten Magelang menetapkan wilayah yang diskenariokan terancam awan panas apabila terjadi letusan adalah wilayah KRB III (10-15 Km) Erupsi Gunung Merapi dan diperkirakan awan panas meluncur kearah barat daya-barat dan barat laut, dengan jarak luncur 8 km kearah sungai-sungai yang berhulu di erupsi Gunung Merapi. Sehingga kawasan yang terancam awan panas meliputi 3 Kecamatan 21 Desa, ditambah 1 desa Tlogolele Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dengan jumlah penduduk terancam sebanyak **49.616** jiwa.

Tabel 5. Kawasan terancam awan panas berdasar skenario

NO	LOKASI			JUMLAH PENDUDUK
	RADIUS KE ARAH	KECAMATAN	DESA	
1	8 km ke arah barat melalui sungai yang berhulu di Merapi	Dukun	Ngargomulyo	2.514
			Kalibening	2.582
			Keningar	621
			Sengi	4.404
			Mangunsuko	1.663
			Sumber	3.802
			Sewukan	2.498
			Dukun (8 Dusun)	2.354
			Krinjing	2.154
			Paten	3.193
			Jumlah	25.785
		Srumbung	Kaliurang	2.516
			Nglumut	798
			Ngargosoko	2.264
			Ngablak	2.412
			Srumbung	3.842
			Mranggen	4.375
			Tegalrandu	2.297
			Kemiren	1.174
			Jumlah	19.678
		Sawangan	Wonolelo, 2 dusun	6.447
			Ketep	2.420
			Kapuan	3396
			Jumlah	12.263
2	Kab. Boyolali	Selo	Tlogolele	2.685
			Jumlah	2.685

Pada skenario Rencana Kontingensi kali ini, sebagai dampak dari bencana Erupsi Gunung Merapi adalah timbulnya pengungsian penduduk radius 8 km dari puncak erupsi Gunung Merapi sebanyak 46.616 jiwa, dengan lama pengungsian selama 2 bulan. Kegiatan pengungsian dimulai saat status Merapi naik menjadi waspada (kelompok rentan diungsikan) dan seluruh warga diungsikan pada saat status Merapi menjadi Awas. Warga di kembalikan dari pengungsian saat status Merapi turun ke status Waspada.

Gambar 9 : Peta prakiraan erupsi gunung Merapi pasca letusan 2010



Sumber : BPPTKG Yogyakarta

Sebagai langkah persiapan dalam mengantisipasi skenario yang tersebut, beberapa desa yang masuk di wilayah VEI (*Volcano Eruption Index*) II telah menjalin kerjasama dengan desa-desa penyangga (*Sister village*) dibawahnya agar bisa menerima pengungsi yang datang dari desa KRB III apabila nanti terjadi bencana Erupsi Merapi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan mampu meningkatkan rasa saling tolong menolong dan gotong royong antara sesama warga. Berikut adalah data desa KRB dan desa penyangga yang telah menjalin kerjasama Desa Saudara (*Sister Village*).

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa KRB III dan Kapasitas Barak di Desa Penyangga

No	Kecamatan	Desa KRB III	Jumlah Penduduk	Desa Penyangga/ <i>Sister Village</i>	Kapasitas TEA/Barak
1	Srumbung	Kaliurang	2.516	Jamus Kauman Pakunden Bligo	2.000 1.300 1.000
2		Nglumut	798	Sucen	525
3		Ngablak	2.412	Kradenan Somoketro Tirto	1.000 120 1.200

4	Srumbung	Ngargosoko	2.264	Gulon Soloboro	2.000 600
5		Tegalrandu	2.297	Bringin Pabelan Wanurejo	500 2.000 1.000
6		Mranggen	4.375	Gunungpring Sokorini	2.700 390
7		Srumbung	3.842	Baturono Tersan Gede	1.500 250
8		Kemiren	1.174	Salam	1.500
9	Sawangan	Kapuhan	3.396	Mangunsari	3.000
10		Wonolelo	6.447	Banyuroto Pogalan	2.000 500
11		Ketep	2.420	Wulunggunung Podosoko Ketundan	800 1.050 700
12		Sumber	3.802	Pucungrejo Sedayu	1.000 1.000
13	Dukun	Ngargomulyo	2.514	Tamanagung	2.670
14		Kalibening	2.582	Adikarto Tanjung	1.200 500
15		Sengi	4.404	Jati Tirtosari Butuh Senden Treko	1.500 1.000 1.000 1.000 500
16		Sewukan	2.498	Ambartawang Rambeanak Mungkid	500 1.500 2.000
17		Paten	3.100	Gondang Paremono Bumirejo Banyurojo Mertoyudan	1.000 500 800 786 1.000
18		Keningar	621	Ngrajek	650
19		Krinjing	2.154	Deyangan	1.000
20		Mangunsuko (KRB II)	1.663	Giyanti	1.00
21		Dukun (KRB II)	5.178	Bojong	2.000
22	Selo- Boyolali	Tlogolele	2.580	Donorojo	1.600

2. DAMPAK KEJADIAN

Pada rencana kontingensi ini, perencanaan dibuat pada tingkat maksimal. Hal tersebut juga berdasarkan beberapa pengalaman terdahulu bahwa jarak luncur awan panas merapi bisa mencapai 8 kilometer, dengan tingkat kerusakan terbesar pada kawasan rawan bahaya III.

Berdasarkan skenario yang ditetapkan, kerusakan dan kerugian yang diperkirakan akan terjadi adalah:

a. Penduduk

Tabel 7. Data Bayi, Balita, Batita, Bumil, Bufas, KRB III Erupsi Gunung Merapi										
NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK			KELOMPOK RENTAN				
			L	P	JUMLAH	BAYI (UMUR 0-1 TH)	BATITA (UMUR 1-3 TH)	BALITA (UMUR 3-5 TH)	BUMIL	BUFAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SRUMBUNG	A. SRUMBUNG	1.944	1.898	3.842	45	129	35	13	
		B. NGLUMUT	404	394	798	22	24	26	6	
		C. MRANGGEN	2.130	2.245	4.375	52	136	141	47	8
		D. NGABLAK	1.194	1.218	2.412	50	75	82	24	3
		E. KALIURANG	1.242	1.274	2.516	72	92	95	19	
		F. NGARGOSOKO	1.140	1.124	2.264	46	79	83	18	
		G. TEGALRANDU	1.158	1.139	2.297					
		H. KEMIREN	573	601	1.174					
JUMLAH PENDUDUK KEC SRUMBUNG			9.785	9.893	19.678	379	665	603	145	11
2	SAWANGAN	A. KAPUHAN	1.648	1.748	3.396	67	37	58	6	
		B. WONOLELO	3.219	3.228	6.447	101	209	170	100	1
		C. KETEP	1.230	1.190	2.420	43	65	54	35	
JUMLAH PENDUDUK KEC SAWANGAN			6.097	6.166	12.263	211	311	282	141	1
3	DUKUN	A. NGARGOMULYO	1.208	1.206	2.514	36	86	84	11	7
		B. SEWUKAN	1.216	1.282	2.498	44	88	88	19	
		C. SUMBER	1.863	1.939	3.802	39	72	70	19	4
		D. MANGUNSOKO	856	807	1.663					
		E. KALIBENING	1.265	1.317	2.582	40	87	86	30	7
		F. DUKUN (KRB II)	2.456	2.722	5.178	80	148	146	29	4
		G. KENINGAR	310	311	621	6	16	14		
		H. SENGI	2.169	2.235	4.404					
		I. KRINJING	1.082	1.042	2.154					
		J. PATEN	1.563	1.537	3.100					
JUMLAH TOTAL KEC DUKUN			10.669 (Tanpa KRB II)	10.867 (Tanpa KRB II)	21.536 (Tanpa KRB II)	245	497	488	108	22
JUMLAH TOTAL			24.277	24.321	48.598	835	1473	1373	394	34

Sumber : Data Primer diolah

b. Fasilitas Umum

Bencana Erupsi Gunung Merapi diperkirakan juga akan mengancam fasilitas umum serta aset yang berada di wilayah kawasan rawan bencana antara lain:

PRASARANA	KERUSAKAN	KETERANGAN
Jalan	Ringan; tertutup debu vulkanik	
Oprit dan Chekdam	Sedang dan Ringan; Oprit tertutup material vulkanik, Chekdam sebagian jebol.	
Sumber dan jaringan air bersih	Berat; mata air tertutup material vulkanik , jaringan pipa air bersih hancur.	Sumber tertutup material vulkanik; jaringan pipa rusak 19 desa kekurangan air bersih.
Rumah	Berat, Sedang dan Ringan; sebagian pemukiman hancur tertutup material vulkanik dan sebagian tertutup debu	Radius 300 m kanan kiri aliran sungai yg berhulu di G.Merapi.
Listrik	Sedang; beberapa tiang listrik roboh	Di beberapa dusun paling dekat dengan puncak merapi

c. Ekonomi

Sarana prasarana ekonomi yang diperkirakan terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi adalah :

KERUSAKAN	KEGIATAN EKONOMI	KELUMPUHAN
Kecamatan Sawangan	Obyek wisata Kedung Kayang, Ketep Pass	2 bulan
Kecamatan Dukun	Pasar Suko, Pasar talun dan Hutan Wisata Babadan	2 bulan
Kecamatan Srumbung	Salak Nglumut di 8 Desa KRB III	6 bulan

d. Pemerintahan

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap sarana prasarana Pemerintahan, terutama terganggunya fungsi administrasi dan pelayanan publik karena sebagian besar aparat pemerintah ikut mengungsi menyelenggarakan tanggap darurat dan sebagian lokasi kantor dipakai untuk pengungsian.

JENIS KERUSAKAN	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN SAWANGAN
Gedung	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan
Dokumen	Sebagian rusak	Sebagian rusak	Sebagian rusak
Pelayanan masyarakat	Terganggu	Terganggu	Terganggu

e. Lingkungan

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa Hutan, kebun, peternakan dan Pertanian. Berikut skenario yang ditimbulkan:

LAHAN	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN SAWANGAN
Kehutanan	Sebagian rusak	Sebagian rusak	Sebagian rusak
perkebunan	Sebagian rusak	Sebagian rusak	Sebagian rusak
peternakan	Produksi turun	Produksi turun	Produksi turun
Pertanian	Sebagian rusak	Sebagian rusak	Sebagian rusak

BAB IV

PENETAPAN TUJUAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT BENCANA SERTA PENGEMBANGAN SISTER VILLAGE

Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi kesimpang-siuran data dan informasi warga terdampak maupun kerusakan, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Penanganan darurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik, sehingga kemajuan hasil kegiatan penanganan darurat kurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan penanganan darurat bencana. Kerap kali dalam situasi darurat aspek-aspek manajemen tidak berjalan sama seperti pada kondisi biasa (bukan darurat). Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi darurat waktu sangat mendesak, semua keputusan berisiko tinggi, seringkali kebutuhan lebih besar dari kemampuan sumber daya dan kewenangan koordinasi menjadi kabur.

Penetapan tujuan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/sarana vital untuk berfungsinya pelayanan publik secepatnya. Tujuan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi penanganan darurat, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, sosial, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan respon darurat. Pentingnya melaksanakan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Rencana operasi ini disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB). Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat juga harus ditetapkan termasuk tata cara pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk manajemen logistik dan peralatan;
2. Penetapan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/ mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana;
3. Terpenuhinya prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab di dalam keadaan darurat

Aspek penting dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait dengan penentuan masa penanganan darurat dan mekanisme operasi kedaruratan yang meliputi:

1. Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status peringatan dini, siaga darurat, dan tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan beserta kegiatannya;
2. Dasar penentuan status di dalam keadaan darurat;
3. Pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat untuk setiap skenario dan jenis bencana;
4. Mekanisme aktivasi rencana operasi penanganan darurat bencana.

A. PENETAPAN TUJUAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Penetapan tujuan diarahkan pada minimalisasi korban meninggal, pemenuhan kebutuhan dasar secara realistis, penanganan skala prioritas tanpa diskriminasi, serta memberdayakan segenap potensi. Kebijakan yang diambil meliputi:

1. Minimalisasi korban meninggal (*road to zero victim*).
2. Penanganan bencana berbasiskan komunitas masyarakat (*sister village*).
3. Titik berat kegiatan penanganan bencana banyak dilakukan pada fase pra bencana (pengurangan resiko bencana).
4. Memadukan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik.
5. Memberikan perlindungan perhatian khususnya kelompok rentan dan disabilitas serta memenuhi kebutuhan dasar secara realistis.
6. Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas tanpa diskriminasi.
7. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya ego klaster.
8. Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan antar negara dalam menggalang bantuan, dengan tetap memperhatikan etika kebangsaan.

B. STRATEGI

- a. Membentuk Posko Utama sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana dengan koordinator BPBD.
- b. Memenuhi pelayanan logistik dengan mendirikan posko-posko, tenda pengungsian dilengkapi dapur umum dengan tetap memperhatikan kelompok rentan.
- c. Memenuhi pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan posko kesehatan di setiap barak pengungsian dan balai kesehatan lain.
- d. Memenuhi pelayanan sarana-prasarana kehidupan (transport, tempat tinggal sementara, sanitasi) di barak/tenda pengungsian (MCK, air bersih), dengan tetap memperhatikan kelompok rentan.
- e. Mengidentifikasi jenis-jenis bantuan, menghimpun bantuan serta mendistribusiukannya
- f. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang membutuhkan
- g. Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebajikan dalam penanganan bencana
- h. Evakuasi korban meninggal dunia dan yang masih hidup melalui relawan, tim SAR, LSM, dll
- i. Penanganan Pengungsi (tenda, logistik, sarana dan prasarana lainnya), lembaga terkait
- j. Mengidentifikasi negara-negara yang memungkinkan memberikan bantuan secara sukarela
- k. Menyebarluaskan informasi tentang bencana yang terjadi melalui, media cetak, elektronik dan telematika
- l. Melakukan evakuasi penduduk wilayah Desa KRB III menuju wilayah Desa Penyangga (*Sister Village*).

C. PENGEMBANGAN SISTER VILLAGE

Salah satu upaya penanganan darurat bencana erupsi gunung Merapi melalui pengembangan sister village (*desa bersaudara*). Konsep desa bersaudara ini dijalankan melalui perjanjian antar desa KRB III dan desa penyangga. Di dalam perjanjian tersebut dijelaskan pembagian peran dalam penanganan darurat bencana. Dengan adanya perjanjian ini mendorong tersusunnya SOP dan rencana kontingensi tingkat desa serta terbentuknya forum PRB Desa.

Tabel 8. Daftar *Sister Village*

KECAMATAN	DESA KRB III	JUMLAH PENDUDUK	DESA PENYANGGA
SRUMBUNG	1. KALIURANG	L : 1.242 P : 1.274 J : 2.516	1. JAMUS KAUMAN, KEC. NGLUWAR 2. PAKUNDEN, KEC. NGLUWAR 3. BLIGO, KEC. NGLUWAR
	2. NGLUMUT	L : 404 P : 394 J : 798	SUCEN, KEC. SALAM
	3. NGABLAK	L : 1.194 P : 1.218 J : 2.412	1. KRADENAN, KEC. SRUMBUNG 2. SOMOKETRO, KEC. SALAM 3. TIRTO, KEC. SALAM
	4. NGARGOSOKO	L : 1.140 P : 1.124 J : 2.264	1. GULON, KEC. SALAM 2. SELOBORO, KEC. SALAM
	5. TEGALRANDU	L : 1.158 P : 1.139 J : 2.297	1. BRINGIN, KECAMATAN SRUMBUNG 2. PABELAN, KEC. MUNGKID 3. WANUREJO, KECAMATAN BOROBUDUR
	6. MRANGGEN	L : 2.130 P : 2.245 J : 4.375	1. GUNUNGPRING, KEC. MUNTILAN 2. SOKORINI, KECAMATAN MUNTILAN
	7. SRUMBUNG	L : 1.944 P : 1.898 J : 3.842	1. BATURONO, KEC. SALAM 2. TERSAN GEDE, KEC. SALAM
	8. KEMIREN	L : 573 P : 601 J : 1.174	SALAM, KECAMATAN SALAM
SAWANGAN	1. KAPUHAN	L : 1. 648 P : 1.748 J : 3.396	MANGUNSARI, KECAMATAN SAWANGAN
	2. WONOLELO	L : 3.219 P : 3.228 J : 6.447	1. BANYUROTO, KEC. SAWANGAN 2. POGALAN, KEC. PAKIS
	3. KETEP	L : 1.230 P : 1.190 J : 2.420	1. WULUNGGUNUNG, KEC. SAWANGAN 2. PODOSOKO, KEC. SAWANGAN 3. 3. KETUNDAN, KEC. PAKIS
DUKUN	1. SUMBER	L : 1.863 P : 1.939 J : 3.802	PUCUNGREJO, KECAMATAN MUNTILAN
	2. NGARGOMULYO	L : 1.208 P : 1.206 J : 2.514	TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN

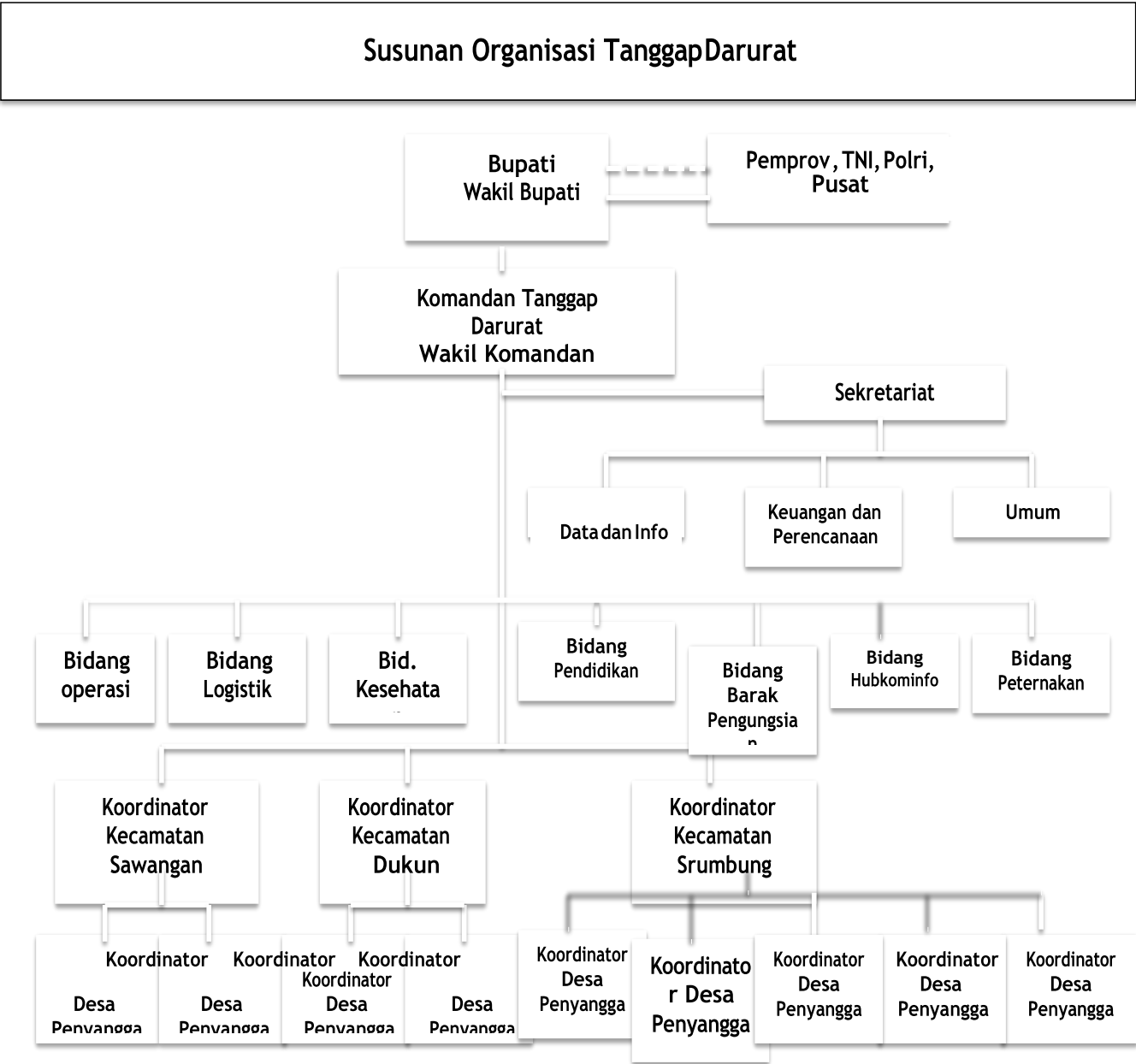
KECAMATAN	DESA KRB III	JUMLAH PENDUDUK	DESA PENYANGGA
DUKUN	3. KALIBENING	L : 1.265 P : 1.317 J : 2.582	1. ADIKARTO, KEC. MUNTILAN 2. TANJUNG, KEC. MUNTILAN
	4. SENGI	L : 2.169 P : 2.235 J : 4.404	1. JATI, KEC. SAWANGAN 2. TIRTOSARI, KEC. SAWANGAN 3. BUTUH, KEC. SAWANGAN 4. SANDEN, KEC. MUNGKID 5. TREKO, KEC. MUNGKID
	5. SEWUKAN	L : 1.216 P : 1.282 J : 2.498	1. AMBARTAWANG, KEC. MUNGKID 2. RAMBEANAK, KEC. MUNGKID 3. MUNGKID, KEC. MUNGKID
	6. PATEN	L : 1.543 P : 1.549 J : 3.092	1. GONDANG, KEC. MUNGKID 2. PAREMONO, KEC. MUNGKID 3. BUMIREJO, KEC. MUNGKID 4. BANYUROJO, KECE. MERTOYUDAN 5. MERTOYUDAN, KEC. MERTOYUDAN
	7. KENINGAR	L : 310 P : 311 J : 621	NGRAJEK, KECAMATAN MUNGKID
	8. KRINJING	L : 1.160 P : 1.047 J : 2.207	DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN

Sumber : BPBD Kabupaten Magelang

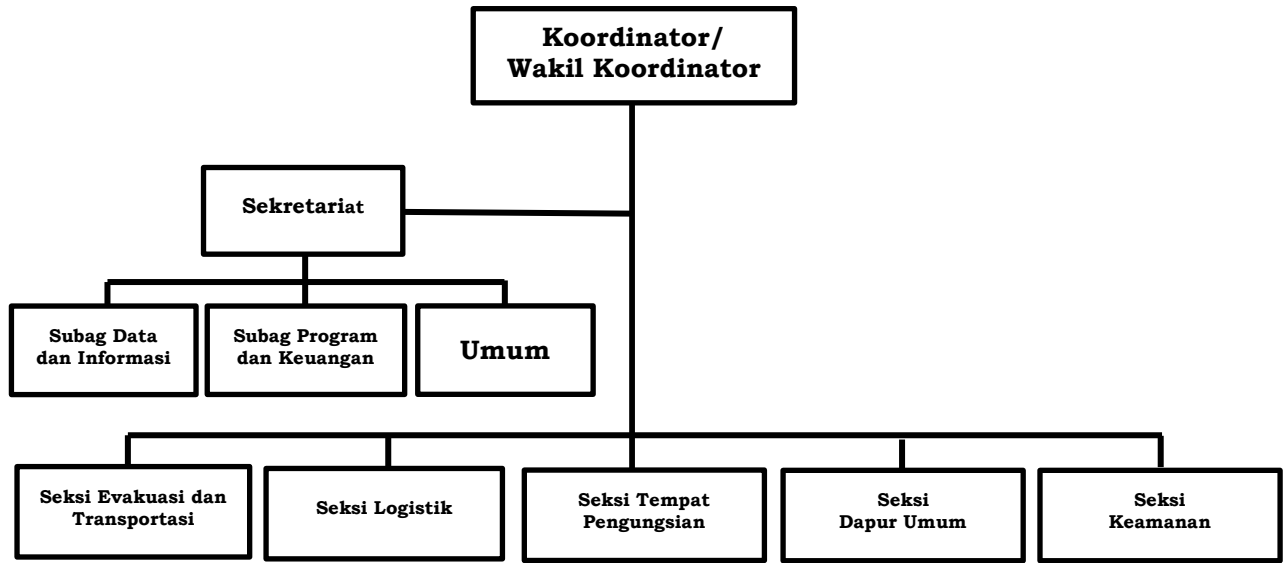
BAB V
PERENCANAAN KLASTER

Pengembangan Klaster disusun agar tujuan Operasi Penanggulangan Bencana letusan Erupsi Gunung Merapi dapat melindungi segenap masyarakat. Pengembangan Klaster dilakukan sebagai fungsi manajemen Penanggulangan Bencana, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman dan kerentanan, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana. Pengembangan Klaster terdiri atas :

- 1. Klaster Manajemen dan Koordinasi (Posko)
- 2. Klaster Kesehatan
- 3. Klaster Evakuasi dan Transportasi
- 4. Klaster Logistik
- 5. Klaster Dapur Umum
- 6. Klaster Barak/TPS/TPA
- 7. Klaster Keamanan
- 8. Klaster Komunikasi
- 9. Klaster Pendidikan
- 10. Klaster Ekonomi



**Susunan Organisasi Pos Lapangan
Kecamatan Sawangan, Dukun dan Srumbung**



Koordinator	: Camat
Wakil	: Sekcam
Sekretariat	: Kasi Trantib
Subbag Datin	: Petugas data Kecamatan
Subbag Program & Keuangan	: Kasubbag Program dan Keuamgan
Subbag Umum	: Kasubbag Adm. Umum
Seksi Evakuasi & Transportasi	: Kasi Tata Pemerintahan
Seksi Logistik	: Kasi Kesra
Seksi Tempat Pengungsian	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Dapur Umum	: TP LPKK Kecamatan
Desa Seksi Keamanan	: Polsek dan Koramil

1. KLASSTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI (Koordinator BPBD Magelang)

a. Situasi :

Diperkirakan terjadi situasi daerah yang tidak terkendali, pengungsi dari 19 desa radius 8 km_dari puncak merapi bergerak menuju Desa Penyangga. Beberapa kegiatan penanggulangan bencana harus diperhitungkan karena adanya sistem yang tidak berfungsi akibat bencana. Dengan demikian harus ada upaya untuk mengendalikan, mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana dalam wadah manajemen dan koordinasi/ Posko.

b. Sasaran

- Terlaksananya koordinasi dengan seluruh lembaga terkait.
- Terkendalinya penanganan bencana
- Terkendalinya pelaksanaan evakuasi secara efektif dan efisien, baik evakuasi penduduk rentan dan produktif, evakuasi korban hidup, evakuasi korban meninggal dan terlaksananya kegiatan pencarian dan penyelamatan korban yang hilang.

- Terkendalinya sistim keamanan lingkungan kawasan rawan bencana
- Terkoordinirnya upaya penanggulangan bencana dan bantuan yang mengalir
- Terdatanya kerusakan dan kerugian harta benda serta korban jiwa akibat bencana
- Terlaksananya sistem komando penanganan darurat bencana
- Terlaksananya evakuasi yang terkendali
- Terlaksananya koordinasi antar klaster
- Terlaksananya pengkajian data dan informasi bencana

c. Kegiatan

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
1	Mendirikan Posko dari tingkat Kab sampai tingkat Desa beserta kelengkapannya	BPBD	Setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya bencana
2	Rakor PB	BPBD	Setiap saat jika terjadi tanda-tanda bencana
3	Mengkoordinasikan kegiatan Klasteral	Posko PB	Setiap hari
4	Membuat laporan menyeluruh	Posko PB	Setiap hari
5	Memberikan arah pelaksanaan Penanggulangan Bencana.	Posko PB	Setiap hari
6	Menerima dan menyampaikan informasi terbaru	Posko PB	Setiap saat

d. Proyeksi Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jml yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil	Orang	195	10	BPBD	Sekretariat 10 orang, 170 orang tugas di TPS, Olah data 5 orang, 10 orang perwakilan Klaster "Sangat Cukup" LSM / Ormas mengutus 2 perwakilan nya untuk menjadi relawan di Posko Induk	Assesment olah data, manajemen adminis-trasi,mana-jemen distribusi bantuan
				5	Bappeda		
				170	Setda		
				2	Bagian Perekonomi an		
				4	Dinsos PPKB PPPA		
				2	DPU & PR		
				4	Polres		
				1	Humas & Protokol		
				4	Diskominfo		
				4	Kodim		
				2	Dinkes		
				2	Dishub		
				2	Disdikbud		
				6	Disdukcapil		
				2	empat sekawan		
				2	Kompag merapi		
				2	ORARI		
				2	Senkom Polri		

				2	GRCC		
				2	Kompas		
				2	Pasag Merapi		
				2	Sigap Merapi		
				2	JME		
				2	KSB		
				2	Peduli Merapi		
				2	TAGAR		
				2	KLM		
				2	MDMC		
				2	RAPI		
				2	PRAMUKA		
				250	Jumlah		
2.	Almari	Buah	188	17	17 Kec.	1 TPS/TPA/ sko 1 bh "Cukup "	Administra si, penyim panan berkas
				170	Balai Desa lokasi TPS		
				2	BPBD		
				2	Kodim		
				5	Dinsos, PPKB & PPPA (TEA Tanjung)		
				196	Jumlah		
3.	Dump Truck	Unit	6	2	DPU & PR	"Cukup "	Alat Angkut Barang di Klaster barak
				1	Bag. Umum Setda		
				4	Dinas LHK		
				1	Disdag & Pasar		
				8	Jumlah		
4.	Faxcimili	Unit	1	1	Dinkes	"Sangat Cukup "	Komunikasi
				1	Disparbud		
				1	RSUD		
				2	Diskominfo		
				1	BPBD		
				6	Jumlah		
5.	GPS	Unit	3	1	BPBD	1 Kec 1 bh "Cukup "	Pemetaan
				2	Kodim		
				1	DPPKAD		
				2	DPU		
				6	Jumlah		
6.	Gudang Logisti Bantuan	Unit	5	4	Kodim	"Kurang 1" Gudang logistik berada di base camp masing- masing	Tempat penyimpa nan logistik bantuan
				2	Bag. Hukum		
				1	Bappeda		
				10	Koordinator Klaster		
				23	Jumlah		
7.	Internet	Gbps	1	1	Diskominfo	"Cukup "	Komunikasi
				1	Telkom		
				1	BPBD		
				3	Jumlah		
8.	Komputer	Buah	3	1	BPBD	"Cukup "	Olah data
				1	Admin bangda		
				1	Kesra		
				4	Kodim		
				1	Bappeda		
				1	DPPKAD		
				9	Jumlah		
9.	Koneksi Internet	Kbps	512	512	Diskominfo	"Cukup "	Olah data

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Laptop	Unit	12	1	BPBD	”Cukup ”	Olah Data dan Adminis trasi
				1	Admin bangda		
				1	DPPKAD		
				3	Disparbud		
				4	Kodim		
				2	Bag.Hukum		
				1	Bappeda		
				10	Koordinator Klaster		
				23	Jumlah		
11.	Mobil Tangki Air	Unit	35	3	Bakorwil	”Kurang 23 ”	Distribusi air bersih di tiap TPS
				4	PDAM Kab		
				2	DPU & PR		
				2	BPBD Jateng		
				1	PDAM Kota		
				12	Jumlah		
12.	Papan Data	Buah	10	1	BPBD	”Cukup ”	Saji Data
				10	Kodim		
				11	Jumlah		
13.	Printer	Buah	3	1	BPBD	”Cukup ”	Adminis trasi
				1	Admin Bangda		
				2	Disparbud		
				1	Kesra		
				4	Kodim		
				1	Bag.Hukum		
				10	Jumlah		
14.	Server	Buah	1	5	Diskominfo	”Sangat Cukup”	Simpan Data
15.	Mobil	Unit	10	2	BPBD	”Cukup ”	Operasional
				5	YEU		
				2	Kodim		
				1	Dinsos PPKB PPPA		
				10	Jumlah		
18.	Peta Tematik	Buah	10				10 Klaster membutuh kan

2. KLAS TER KESEHATAN (Koordinator Dinas Kesehatan)

a. Situasi.

Diperkirakan akan ada penduduk yang meninggal dunia, menderita luka bakar, penyakit ISPA, Conjunctivitis, Diare serta kejadian luar biasa penyakit dan gangguan psikologis selama di pengungsian.
Di samping itu juga akan mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

b. Sasaran.

Terlaksananya penanganan krisis kesehatan secara cepat, tepat dan terpadu bagi penyintas/pengungsi.

c. Kegiatan.

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
1.	Menyiapkan : a. Tim reaksi cepat pelayanan kesehatan. b. Penilaian awal kesehatan (RHA).	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU	Status Siaga Merapi
2.	Menyiapkan obat, bahan habis pakai (reagen) dan alat kesehatan.	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU	s.d.a

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
3.	Membentuk pos kesehatan lapangan, rumah sakit lapangan dan yankes bergerak	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU	s.d.a
4.	Mengaktifkan Puskesmas yang tidak terkena bencana selama 24 jam	Dinas Kesehatan	s.d.a
5.	Menyiapkan pelayanan rujukan	Dinas Kesehatan, RSUD	s.d.a
6.	Menyiapkan penanggulangan gawat darurat medik missal	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI, MDMC, YEU	
7.	Menyiapkan pengawasan air bersih dan sanitasi	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI, MDMC, YEU	
8.	Menyiapkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi	Dinas Kesehatan	
9	Menyiapkan pengawasan gizi dan makanan	Dinas Kesehatan	
10.	Menyiapkan pengawasan tempat penampungan pengungsi	Dinas Kesehatan	
11.	Menyiapkan surveilance penyakit menular	Dinas Kesehatan	
12.	Pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU	
13.	Menyiapkan pelayanan kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU	
14.	Menyiapkan pelayanan kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI, MDMC, YEU, RSJ. Prof. dr.Soedjono	
15.	Mobilisasi bantuan kesehatan	Dinas Kesehatan	
16	Menyiapkan penanganan post traumatik stress (trauma healing)	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU, UMM	
17	Penyelamatan korban <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan status kesehatan korban (triage)• PPPK• Mempersiapkan rujukan	Dinas Kesehatan, PMI, RSUD, MDMC, YEU, UMM	
18.	Menyiapkan pos kesehatan di tempat pengungsian	Dinas Kesehatan	
19.	Menyiapkan sarana transportasi untuk tim reaksi cepat Yankes	Dinas Kesehatan, RSUD, SAR Kab., MDMC, PMI	



Gambar 6. Alur Pelayanan Kesehatan

d. Proyeksi Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tim Reaksi Cepat	Tim		4 15 3 5	Dinkes, RSUD, MDMC, PASAG,JME KSB	“ Cukup “ Tim PPGD dari PASAG, JME, dan KSB	Pelayanan
	Dokter Umum	Orang		29 2	Dinkes TAGAR		
	Spesialis Bedah			2 1	Dinkes Kodim		
	Spesialis Anestesi			2 1	Dinkes Kodim		
	Perawat Mahir			60 1	Dinkes Kodim		
	Tenaga DVI			29 1	Dinkes Kodim		
	Apoteker			3 1	Dinkes Kodim		
	Sopir Ambulance			10 1	Dinkes Kodim		
	Surveylans			2	Dinkes		
	Epidemologi			1	Kodim		
	Petugas Komunikasi			2 1	Dinkes Kodim		
	Dokter Umum		27	45 1 2 7 30	Dinkes Kodim TAGAR RSUD MDMC	1 TPS/TPA 1 Dokter “kurang 35”	Pelayanan Medis
	Dokter Spesialis		5	20 2 5 1	RSUD Dinkes MDMC Kodim	“Cukup” 1 dokter spesialis bedah dari Kodim	Pelayanan Medis
	Perawat		54	193 165 1 30	RSUD Dinkes Kodim MDMC	2 Perawat 1 TPS/TPA 1 shift 8 Jam “ Cukup “	Pelayanan Medis
5.	Apoteker	Orang	4	3 2 10 1	RSUD Dinkes MDMC Kodim	”Cukup”	Pelayanan Medis
6.	Assisten Apoteker		27	32 17 1 10	Dinkes RSUD Kodim MDMC	“Cukup”	Pelayanan Medis
7.	Bidan		27	77 22 1 5	Dinkes RSUD Kodim MDMC	1TPS/TPA 1 Bidan ”Cukup”	Pelayanan Medis
8.	Tenaga Enthomolog		1	2 1	Dinkes Kodim	“Cukup”	Pelayanan Medis
9.	Tenaga Fisiotherapi			5 3 1 1	MDMC RSUD Kodim Dinkes	“Cukup”	
	Sanitarian		9	27 1 5	Dinkes Kodim MDMC	“Cukup”	Medis Pelayanan Medis
1	2	3	4	5	6	7	8

10.	Ahli Gizi / Petugas Gizi		18	8 10 1	RSUD MDMC Kodim	“Cukup“	Medis
11.	Tenaga Rontgen		5	6 2 5	RSUD Dinkes MDMC	“Cukup“	Medis
12.	Tenaga Administrasi		9	159	Dinkes	“Cukup“	Adminis trasi
13.	Ambulance	Unit	9	29 1 1 1 1 1 1 1 7	Dinkes Kodim Polres RSI Ibnu S. RSU Tidar RST PMI RS Muntilan BPBD MDMC	“Cukup“	Sarana Kesehatan
14.	Puskesmas	Unit	6	2 9	Dinkes	“Sangat Cukup“	Sarana Kesehatan
15.	Pustu/pusling	Paket	9	3 5	Dinkes	“Cukup“	Sarana Kesehatan
16.	Pos Kesehatan Desa	Unit	60	252	Dinkes/Desa	“Cukup“	Sarana Kesehatan
17.	Rumah Sakit Rujukan	Unit	5	1 1 1 1 1 1 1	RSU Tidar RST RS.Sardjito RSIA Muntilan RSJ Mglang PKU Muh. Yogya	“Cukup“	Sarana Kesehatan
18.	Diagnostic set	Paket	9	9	Dinkes	1 Paket 1 TPS/TPA “Kurang 141“	Pemeriksa an Umum
19.	Timbangan (Bayi dan Dewasa)	Unit		29	Dinkes	1 Paket 1 TPS/TPA ” Kurang 141”	Pemeriksa an Umum
20.	Heacting Set	Paket		29	Dinkes	1 Paket 1 TPS/TPA ”Cukup”	Jahit Luka
21.	Partus Set	Paket	60	252	Dinkes	1 Paket 1 TPS/TPA ”Cukup”	Ibu Bersalin
22.	Perawatan Luka Set	Paket	60	252	Dinkes	1 Paket 1 TPS/TPA ”Cukup”	Perawatan Luka
23.	Bed Periksa	Buah	60	252	Dinkes	1 Bed 1 TPA “Cukup“	Ibu Bersalin/ Pemeriksa an Umum
24.	Lampu periksa	Buah	60	252	Dinkes	1 Lampu 1 TPA/TPS “Cukup“	Tindakan Medis
25.	Waskom Cuci Tangan	Buah	60	252	Dinkes	2 Waskom 1 TPA/TPS “Cukup”	Pemeriksa an Umum
26.	Bengkok	Buah	60	252	Dinkes	2 Bengkok 1 TPA/TPS “Cukup“	Pemeriksa an Umum
27.	Dragbar/Tan du Lipat	Buah	27	29 5 6	Dinkes PMI BPBD	“Cukup“	Alat Angkut Darurat
28.	Tempat Tidur	Buah	2517	205	RSUD		Sarana Rujukan

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Obat-Obatan	Paket	27	1 40 30	RSUD Dinkes MDMC	“cukup”	Sarana Kesehatan
30.	Sarung Tangan	Box isi 100	170	0		1 TPS 1 Box “Kurang 170”	Sarana Kesehatan
31.	Mobil bak terbuka	Unit	10	1 2 3	Dinkes KPU DPU	”Kurang 4”	Distribusi
32.	Kantong mayat	Buah	27	30 10	PMI SAR	”Cukup”	Sarana
33.	Kantong darah	Buah		300	PMI & RSUD	”Cukup”	
34	Kursi Roda	Buah	27	29 10	Dinkes RSUD	1 TPS/TPA 1 Buah ”Cukup”	Sarana Kesehatan
35.	Sanitarian Kit	Set	9	29	Dinkes	”Cukup”	
36.	Tabung Oksigen	Buah	27	29 2 100 1 15	Dinkes PMI RSUD DPU MDMC	”Cukup”	Bantuan Pernafasan
37	Konseling Kejiwaan	Orang	9	5 29 1 20	Tagana Dinkes RSUD MDMC	1 TPS/TPA 1 Orang Kurang 115	
38	Obat	Paket		5000	YEU		

3. Klaster Evakuasi dan Transportasi (Koordinator : Dinas Perhubungan)

a. Situasi

Terjadi pengungsian penduduk dari 19 desa di radius 8 km dari puncak merapi secara mendadak, berakibat tersendatnya arus transportasi saat evakuasi. Disamping itu juga terjadi kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana umum. Sehingga arus transportasi terputus, rusaknya infrastruktur, terdapatnya korban jiwa dan luka – luka.

Untuk itu diperlukan sarana transportasi untuk memobilisasi pengungsi pada saat sebelum terjadi erupsi, agar korban dapat dikurangi. Rusaknya sarana perhubungan akan mempengaruhi kelancaran upaya evakuasi penduduk dan penyaluran bantuan.

b. Sasaran

- Terangkutnya semua pengungsi ke lokasi penampungan sementara yang telah disiapkan.
- Terangkutnya korban luka berat dan ringan ke posko kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan dengan memprioritaskan korban luka berat.

c. Kegiatan

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
1	Menyiapkan armada transport evakuasi.	Dishub, Polres, Kodim, Satpol PP, Komonitas offroad dan trail	Siaga Merapi
2	Staffing (personil)	Dishub, Polres, Kodim, Satpol PP, relawan.	Setiap waktu
3	Persiapan BBM, oli, Suku cadang	Dishub	Setiap waktu

NO	KEGIATAN	PELAKU	WAKTU
4	Memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas	Dishub, Polres, Kodim, Satpol PP.	Setiap waktu

d. Proyeksi Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil / relawan	Orang	1.125	46 750 500 200 100 200 200 6	Dishub Polres Kodim Armed 3 Rindam Armed 11 Akmil Bag.Umum Setda	1 Kendaraan 2 Orang yang menguasai manajemen evakuasi "Cukup"	Evakuator
				2	Bapermas puan dan KB		
				15	Empat Sekawan		
				20	Kompas		
				10	Kompag Merapi		
				3	GRCC		
				10	Senkom Polri		
				20	Sigap Merapi		
				15	JME		
				2	KSB		
				660	Linmas		
				20	Pasag Merapi		
				30	Peduli Merapi		
				25	TAGAR		
				2	KLM		
				2	MDMC		
				20	ORARI		
				52	SAR		
				10	PMI		
				20	Tagana		
				5	LPBNU		
				45	Kec.Srumbung, Sawangan dan Dukun		
				15	Perhutani		
				24	DPU & PR		
				30	Pramuka (Ubaloka)		
				30	Dasipena (Dinkes)		
				5	BPBD		
				95	KOKAM		
				160	Gema Bakti		
				3.349	Jumlah		
2.	Backhoe Loader	Unit	1	1	DPU & PR	"Cukup"	Evakuasi korban
3.	Cangkul	Buah	180	20 36	BPBD TAGAR	"Kurang 124"	Evakuasi
				56	Jumlah		
4.	Carabiner	Unit	8	8	BPBD	"Cukup"	Evakuasi
				10	YEU		
				18	Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Carmantel	Unit	5	3	BPBD/SAR	"Kurang 1"	
				1	YEU		
				4	Jumlah		
6.	Excavator	Unit	1	3	DPU & PR	"Cukup "	Evakuasi korban
7.	Gergaji Chainsaw	Buah	9	3	DPUPR	1 Kec 3 Alat	Evakuasi
				2	BPBD	Buah "Cukup"	
				2	Dinas LHK		
				1	Bag. Umum Setda		
				1	Empat Sekawan		
				2	Kompas		
				2	Kompag Merapi		
				2	Sigap Merapi		
				1	KSB		
				1	Peduli Merapi		
				2	Tagar		
				4	Pasag Merapi		
				23	Jumlah		
8.	Perahu Karet	Unit		1	YEU		
9.	Jembatan	KM x M	32 x 4,5	32 x 4,5	Mangunsoko-Sengi (Trising)	Kondisi Baik	Perlu Verifikasi Data ke Dinas PU
					Tlatar Gowok Sabrang (Pabelan)	Putus	
			61 x 4,1 3 x 6 5 x 5 3 x 3,8 24 x 5	61 x 4,1 3 x 6 5 x 5 3 x 3,8 24 x 5	Tlatar -Talun (Pabelan) (Dukuh) (Sewukan) (Mangunsoko) (Senowo)	Putus	
			10,5 x 8 15 x 4	10,5 x 8 15 x 4	Muntilan – Talun (Banyubiru) (Abang)	Kondisi Baik	
			4 x 3,8 6 x 4,8 8 x 4,8	4 x 3,8 6 x 4,8 8 x 4,8	Dukun-Demo (Demo 1) (Demo 2) (Demo 3)	Kondisi Baik	
			3 x 3,5 3,5 x 4,5 5 x 3,3	3 x 3,5 3,5 x 4,5 5 x 3,3	Mranggen – Polengan (Pandan) (Jlegong) (Druju)	Kondisi Rusak 0,5 km, Rusak Berat 0,4 km	
			3 x 4	3 x 4	Muntilan – Keningar (Duren)	Sandaran sedang	
			29 x 3,5	29 x 3,5	Srumbung-JurangJero (Putih)	Kondisi Sandaran Rusak Berat	
			5 x 4,8 4 x 5	5 x 4,8 4 x 5	Kamongan-Kaliurang (Kamongan) (Krasak)	Kondisi Bang Atas Rusak Berat, Sandaran Sedang	
			2,5 x 5,5 3 x 5,5 3,25 x 4 4,5 x 3,8	2,5 x 5,5 3 x 5,5 3,25 x 4 4,5 x 3,8	Salam – Kali Gesik (Tetel) (Celeng) (Sudimoro) (Kamongan)	Kondisi Sandaran Sedang Sandaran Rusak Sandaran Sedang Rusak Berat	

1	2	3	4	5	6	7	8
			7 x 6 3 x 3 4 x 3,4 3 x 4,8 2,8 x 5	7 x 6 3 x 3 4 x 3,4 3 x 4,8 2,8 x 5	Gulon – Salamsari (Mandungan) (Dermo) (Klembar) (Wungu)(Druju)	Kondisi Baik Sedang Rusak Berat	
			5 x 5 8 x 4 5 x 3,7	5 x 5 8 x 4 5 x 3,7	Dukun – Ngargomulyo (Krecek) (Lamat) (Kalibening)	Kondisi Baik Bangatas sedang	
			2 x 3 3 x 3 12.5 x 3 4 x 3,8	2 x 3 3 x 3 12.5 x 3 4 x 3,8	Srumbung – Sudimoro (Gremeng) (Trolikan) (Batang) (Duren)	Kondisi Baik Sandaran rusak Bangatas rusak Lantai sandaran sedang	
			19 x 3 15 x 3,3 5 x 5,4	19 x 3 15 x 3,3 5 x 5,4	Ketunggeng– Pucanganom (Lamat) (BlongKeng) (Bunut)	Kondisi Baik	
10.	Rambu- Rambu Evakuasi	Buah	76	76	Dishub	Cukup	
11.	Ruas Jalan Evakuasi	KM x M	3,65 x 4	3,65 x 4	Krakitan – Jeruk Agung	Rawan Banjir Kondisi Baik 1 km Sedang 2,65 km	Jalur Evakuasi
			3,8 x 4	3,8 x 4	Mangunsoko- Paten	Kondisi Baik 3,8 km	
			0,4 x 4	0,4 x 4	Mangunsoko – Sengi	Kondisi Baik 0,4 km	
			5,9 x 4	5,9 x 4	Tlatar Gowok Sabarang	Kondisi Baik 5,9 km	
			2,35 x 4	2,35 x 4	Tlatar –Talun	Kondisi Baik 2,35 km	
			8,3 x 4	8,3 x 4	Muntilan- Talun	Kondisi Baik 4,35 km Sedang 2,75 km, Rusak Berat 1,2 km	
			1,2 x 4	1,2 x 4	Dukun - Demo	Kondisi Rusak Berat 1,2 km	
			1,4 x 4	1,4 x 4	Mranggen – Polengan	Kondisi Rusak 0,5 km, Rusak Berat 0,4 km	
			11,3 x 3	11,3 x 3	Keningar	Kondisi Baik 7,8 km, Rusak Berat 3,5 km	
			3,5 x 4,5	3,5 x 4,5	Tegalsari – Srumbung	Kondisi Baik 3,5 km	
			7,8 x 4	7,8 x 4	Srumbung – JurangJero	Kondisi Baik 7,8 km	
			8 x 3	8 x 3	Mangunsoko- Babadan	Kondisi Baik 4 km, Rusak Berat 4 km	
			1,9 x 4	1,9 x 4	Kamongan – Kaliurang	Kondisi Baik 1,9 km	
			10 x 4	10 x 4	Salam – Kali Gesik	Kondisi Baik 10 km	

1	2	3	4	5	6	7	8
			8,1 x 4	8,1 x 4	Gulon – Salamsari	Kondisi Baik 7,1 km Sedang 1 km	
			3,2 x 4	3,2 x 4	Dukun – Ngargomulyo	Kondisi Baik 3,2 km	
			4,8 x 4	4,8 x 4	Muntilan – Srowol	Kondisi Baik 4,8 km	
			2,4 x 4	2,4 x 4	Srumbung – Sudimoro	Kondisi Baik 0,50 km, Sedang 1,90 km	
			6 x 4	6 x 4	Ketunggeng- Pucanganom	Kondisi Sedang 4,5 km Rusak 1,5 km	
12.	Jas Hujan	Buah	2.000	0		”Kurang 2.000”	Pendukung
13.	Mantel	Buah	50	20	BPBD	”Kurang 30”	Pendukung
14.	Megaphone	Buah	90	3	BPBD	1 Desa 2 Buah Kurang 23	Alat Evakuasi
				30	Pasag Merapi		
				21	Desa		
				6	Kecamatan		
				1	Polres		
				1	Kodim		
				1	Relawan PKS		
				1	KOKAM		
				2	Tagana		
				1	KPU		
	Kendaraan Roda 4	Unit	1258		Total		
15.	Mobil/ Minibus	Unit		1.370	Desa	1 Dusun 2 Kendaraan “ Cukup “	Transport evakuasi
				5	Kodim		
				6	Dinkes		
				4	RSUD		
				2	DINAS LHK		
				1	Perhutani		
				1	Kec. Dukun		
				2	Kompak Merapi		
				4	KOKAM		
				1	Sigap Merapi		
				1	TAGAR		
				4	KLM		
				4	MDMC		
				8	Disperindagkop		
				4	Bag. Umum Setda		
				1.417	Jumlah		
	Pick up	Unit		513	Desa		
				34	Polres		
				3	DPU & PR		
				1	Setda		
				2	KPU		
				1	Dinkes		
				10	KOKAM		
				564	Jumlah		
	Truk	Unit		15	Kodim		
				3	Polres		
				4	DPU & PR		
				1	Perhutani		
				23	Jumlah		
	Jeep	Unit		20	IOC		
				1	Kompas		
				1	Kompag Merapi		
				22	Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Motor	Unit		1	Kec.Dukun		
				5.186	Desa		
				20	Dinkes		
				3	BPK RSU		
				4	Kec. Dukun		
				200	Kodim		
				5414	Jumlah		
17.	Mobil Jenasah	Unit	3	1	PMI	“ Cukup “	Transport Jenasah
				1	RSUD		
				2	Kodim		
				4	Jumlah		
18.	Pelampung	Unit	8	8	BPBD	” Cukup ”	Alat Evakuasi
				25	PMI		
				12	MDMC		
				12	TAGAR		
				57	Jumlah		
19.	Pengeras Suara	Unit	170	227	Desa	1 TPA/TPS 1 Buah ” Sangat Cukup ”	
20.	Pompa air	Unit	40	3	BPBD	”Kurang 32”	Yang bisa dipindah
				3	DPU ESDM		
				2	TAGAR		
				8	Jumlah		
21.	Sekop	Buah	50	20	BPBD	”Kurang 30”	
22.	Selang	Meter	50	50	Disperten Tanaman pangan	” Cukup ”	
				2	TAGAR		
				52	Jumlah		
23.	Selang pompa air	unit		3	BPBD		
24.	Selang pompa hisap	unit		3	BPBD		
				3	Empat Sekawan		
				3	Kompas		
				3	Kompag Merapi		
				3	ORARI		
				3	Senkom Polri		
				3	Pasag Merapi		
				3	Sigap Merapi		
				3	JME		
				3	KSB		
				3	Peduli Merapi		
				3	TAGAR		
				3	KLM		
				3	MDMC		
				3	RAPI		
				45	Jumlah		
25.	Senter			4.066	Desa		
				60	SAR		
26.	Sepatu Boot			20	SAR		

4. Klaster Logistik (Koordinator Dinsos PPKB PPPA)

a. Situasi

Terjadinya erupsi Erupsi Gunung Merapi mengakibatkan banyaknya penduduk yang mengungsi di tempat evakuasi telah disediakan dan desa penyangga. Pada kondisi tersebut masyarakat sangat membutuhkan bantuan berupa pangan, sandang dan gudang logistik serta kebutuhan harian lainnya.

b. Sasaran

- Terlayaninya semua kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai kepada orang tua dan petugas.
- Terlaksananya penyiapan, penerimaan, penyortiran dan penyimpanan logistik dengan baik.
- Terlaksananya distribusi logistik dengan baik dan akuntabel.

c. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Menyiapkan kebutuhan personil dan logistik sesuai kebutuhan	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	Mulai Siaga Merapi
2	Distribusi logistik sampai tujuan melalui pos Kecamatan	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	Sda
3	Menerima dan mensortir logistic	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	Sda
4	Mencatat keluar masuk logistic di Posko Kabupaten	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	Sda
5	Melaporkan setiap perkembangan Klaster ke posko Kabupaten	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	Sda
6	Menyiapkan/mencatat data pengungsi yang telah di evakuasi	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	
7	Melakukan pengendalian/kontrol dan pengawasan terhadap bantuan yang masuk baik di pos kecamatan maupun TPA/TPS	Dinsos PPKB PPPA, Bag Perekonomian, BPBD, Disdagkop dan UKM, Dinas Peterikan, Dinas Pertanian, Disperinaker	

d. Proyeksi Kebutuhan Klaster LOGISTIK

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil	Orang	235	5	BPBD	1 TPS 2 orang, 30 orang di gudang posko ”Cukup”	
				20	Setda		
				300	Desa/Kel		
				22	Kecamatan		
				33	Lingkungan Hidup		
				8	Dinsos PPKB PPPA		
				60	Kodim		
				3	Dinas Pasar		
				2	Empat Sekawan		
				2	Kompag merapi		
				2	ORARI	Tambahan 32 dari perwakilan masing-masing LSM / Ormas di Magelang	
				2	Senkom Polri		
				2	GRCC		
				2	Kompas		
				2	Pasag Merapi		
				2	Sigap Merapi		
				2	JME		
				2	KSB		
				2	Peduli Merapi		
				2	TAGAR		
				10	TAGANA		
				2	KLM		
				2	MDMC		
				2	RAPI		
				2	PRAMUKA		

No.	Jenis kebutuhan	Satuan	Volume						Jml Ketersediaan	Kesenjangan
			Jml Pengungsi	Jml Petugas	Kebutuhan	Waktu/Hr	Harga Satuan	Jumlah (Rp/kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Beras	0,4Kg/Org/Hr	51.342	5000	22.536	30	-	676.104	100 Ton	576.104
2.	Lauk Pauk (gula, teh, kopi, sarden, mie nstan, kecap, telur dll)	Rp 7.500/org/Hr	51.342	5000	422.565.000	30	5.000	12.676.950.000	0	12.676.950.000
3.	Susu Bayi dan Balita	30Gr/Hr/Bayi	1.027	0	31 dus @ 1000 Gr	30	60.000	55.800.000	0	55.800. 000
4.	Makanan Bayi dan Batita	70Gr/Bayi Batita/Hr	1.072	0	75 dus @1000 gr	30	40.000	90.000.000	0	90.000.000
5.	Susu Ibu Menyusui	20Gr/org/Hr	1.072	0	21 dus @ 1000 gr	30	60.000	37.800.000	0	37.800.000
6.	Vitamin/Tambah Darah Bumil	1Tablet/Org/Hr	1.072	0	1.072 tablet	30	1.000	32.160.000	0	32.160.000
7.	Air Mineral gelas	3gls/org/Hr	51.342	5000	169.026	30	350	1.774.773.000	0	1.774.737.000
8	Diapers Bayi	3 Bh/ Bayi/Hr	1.027	0	3.081	30	4.000	359.720.000	0	
9	Handuk	1 Lbr/org	51.342	0	51.342	1	25.000	1.283.550.000	0	
10	Masker (Hijau)	1Bh/Org/Hr	51.342	5.000	56.342	30	750	1.267.695.000	0	
11	Pasta Gigi Family	1Bh/org/Bln	51.342	5.000	56.342	30	4.000	225.368.000	0	
12	Pembalut Wanita	3 Bh/Org/hr	12.835	0	38.505	30	1.000	1.155.150.000	0	
13	Sabun Cuci	0,5 Kg/Org	51.342	0	116.855	1	5.000	128.355.000	0	
14	Sabun Mandi	1 Bh/org/Bln	51.342	5.000	56.342	1	1.400	78.873.800	0	
15	Selimut	1 Lbr/org	51.342	0	51.342	1	25.000	1.283.550.000	0	
16	Sikat Gigi	1 Bh/Org/bl	51.342	0	51.342	1	2.000	102.684.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Hygine kit	2000 paket	-	-	-	-	-	-	2000	YEU
BBM Operasional										
18	Truk	25 ltr x 4 bh	-	-	100	30	7.200	21.600.000	0	
19	Mobil	10 ltr x 17 bh	-	-	170	30	74.000	37.740.000	0	
20	Sepeda motor	3 ltr x 170 bh	-	-	510	30	7.400	113.220.000	0	
21	Dukungan Operasio nal Petugas/ Relawan	22.500/org/hr	0	5.000	5.000	30	22.500	3.375.000.000	0	

5. **Klaster Tempat Evakuasi (Koordinator Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)**

a. **Situasi**

Terjadi pengungsian penduduk di 19 desa radius 8 km dari puncak merapi, akan terjadi penumpukan penduduk pada tempat-tempat tertentu. Untuk itu perlu diusahakan tempat-tempat penampungan yang sudah disiapkan dan dilengkapi dengan kebutuhan dasar pengungsi dan mampu untuk menampung seluruh pengungsi.

b. **Sasaran**

- Tersedianya barak pengungsian yang memenuhi syarat.
- Tersedianya air bersih yang mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi.
- Tersedianya sanitasi yang mencukupi.
- Tersedianya penerangan lokasi barak
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan barak pengungsian

c. **Kegiatan**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Menyiapkan barak sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat	DPU PR, PMI, Kesbangpol, DPR KP	Mulai Siaga Merapi
2.	Menyiapkan sarana-prasarana Areal Pengungsian : <ul style="list-style-type: none">• Air Bersih• Penerangan/listrik• Sanitasi• MCK• Tenda	DPU PR, PMI, Kesbangpol, Dinsos PPKB PPPA, PDAM, BPBD, Desa penyangga	
3.	Melaksanakan pengelolaan sampah di lokasi barak	DPU PR, STAM, Pengungsi, DLH	

d. **Proyeksi Kebutuhan**

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Personil / Relawan	Orang	850	5	DPU & PR	1 TPS/TPA 5 Orang "Cukup"	Pengurus
				2	BPBD		
				1	Dinsos PPKB PPPA		
				15	Disdagsar dan umkm		
				100	Kodim		
				5	Dipermades		
				2	empat sekawan		
				2	Kompag Merapi		
				2	Senkom Polri		
				2	GRCC		
				2	Kompas		
				2	Pasag Merapi		
				2	Sigap Merapi		
				2	JME		

1	2	3	4	5	6	7	8
				2	KSB		
				2	Peduli Merapi		
				2	TAGAR		
				2	KLM		
				2	RAPI		
				2	PRAMUKA		
				3	Setda		
				10	Badan LH		
				850	Linmas/Desa		
				150	MDMC		
				1.169	Jumlah		
2	Bak Tandon	Unit	850	4	BPBD	5 bak /TPS Kurang 720	Penampung an air bersih di TPA/TPS
				10	PDAM		
				100	PMI		
				3	YEU		
				1	Kompag merapi		
				118	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Bantal		116.855	200	Dinsos PPKB PPPA		Tidur
4	Bilik Mesra	Unit	170	0		1 TPS/TPA 1 Unit	Tempat pemuhan biologis dan psikologis
5	Gayung Mandi		1700	0		1TPS/TPA 20 Gayung, Kurang 800	Alat Mandi
6	Genset	Unit	170	1	Kec Dukun	1 TPS/TPA 1 Genset, Kurang 142	Penerangan
				1	Kec Srumbung		
				4	Dinsos PPKB PPPA		
				1	Relawan PKS		
				1	DPU & PR		
				8	BPBD/SAR		
				1	KPRI		
				2	YEU		
				1	Dinas LH		
				2	Disperindag kop		
				2	Kompag Merapi		
				2	TAGAR		
				28	Jumlah		
7	Gentong	Buah	1700	1	TAGAR	Kurang 1700	Alat Mandi
8	Gudang Sarpras	Unit	3	1	Dinsos PPKB PPPA	Kurang 2	Tempat penyimpan barang- barang pengungsi
9.	Gudang Logistik darurat	Unit	170	0		1TPS/TP A 1 Gudang, kurang 170	Tempat penyimpan logistik di TPA/TPS
10.	Gudang Logistik pusat	Unit	5	2 1 1 1	Dinsos PPKB PPPA Pramuka PDAM MDMC	Cukup	Tempat penyimpan logistik Pusat
				5	Jumlah		
11.	Kotak P3K	Set	170	0		Kurang 170	Pertolongan pertama

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Lampu Zakelik	Unit	170	6	BPBD	Kurang 163	Penerangan darurat
				1	Kec.Srumbung		
				7	Jumlah		
13	Jamban		3.400	36	TEA Tanjung	Kurang 2.084	1 untuk 15 orang
				340	Balai Desa		
				40	YEU		
				416	Jumlah		
14	Jerigen Air 5 Liter		3.400	0		Kurang 3.400	Kebutuhan air bersih utk anak
15	Kamar mandi		3.400	36	TEA Tanjung	Kurang 3.024	
				340	Balai Desa		
				376	Jumlah		
16	Kantong plastik 1 mtr x 0,6 m		60.480	0		Kurang 60.480	1 Untuk 3 KK/Hari
17	Karpet		170	0		Kurang 170	Sholat
18	Kasur		116.855	2.000	Dinsos PPKB PPPA	Kurang 114.855	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kursi			60	Dinsos PPKB PPPA		
22	Megaphone	Buah	170	5	Kompag Merapi	1 TPS/TPA 1 buah Kurang 165	1 untuk 1 Dusun
23	Meja	Buah		20	Dinsos PPKB PPPA		
24	Pengeras Suara	Unit	170	170	Desa	Cukup	
25	Pompa air	Unit		1	Dukun		
				3	BPBD		
				4	Jumlah		
27	Sprei	Buah	116.855	100	Dinsos PPKB PPPA	Kurang	
28	Sumur	Unit		4	Dinsos PPKB PPPA		
29	Tempat parkir		170	170	Desa	Cukup	
30	Tempat ibadah	Unit	170	170	Desa	Cukup	
				5	MDMC		
				175	Jumlah		
31	Tenda Famili	Unit		10	PMI		
32	Tenda Pleton	Unit	350	60	BPBD	Kurang 262	Pos Jaga 40, Penampungan 100, Dapur Umum 40
				5	Kodim		
				1	Polres		
				3	Dinsos PPKB PPPA		
				1	Perhutani		
				1	PMI		
				2	Kompak Merapi		
				6	Baguna		
				3	MDMC		
				6	TAGAR		
				88	Jumlah		
33	Shelter box	Unit		300	GP Anshor		
34	Tenda Pos Kesehatan		170	0			

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Terpal		720	63	Pasag	Kurang 496	4x6 m
				100	PMI		
				40	Dinsos PPKB PPPA		
				20	BPBD/SAR		
				1	TAGAR		
				224	Jumlah		
36	Tikar	Lbr	4.000	2.000	Gudang	Kurang 540	Alas Kasur
				750	Dinsos PPKB PPPA		
				200	PMI		
				10	Dukun		
				500	Relawan PDIP		
				3.460	Jumlah		
37	Titik Kumpul	Unit	45	45	Balai Desa		
38	Tong sampah	Buah	850	0		1 TPS 5 buah Kurang 850	
39	TV 21		170	22	Setda	Kurang 147	
				1	Dukun		
				23	Jumlah		

6. Klaster Dapur Umum (Koordinator : Dinas sosial PPKB PPPA)

- a. Situasi
- Terjadi letusan Erupsi Gunung Merapi, berakibat adanya pengungsian penduduk dari 19 desa radius 8 km dari puncak merapi di tempat pengungsian yang memerlukan bantuan makanan siap saji. Untuk mencukupi hal tersebut perlu disiapkan dapur umum yang memadai.
- b. Sasaran
- Terlayannya kebutuhan makan dan minum bagi pengungsi.
 - Terlayannya kebutuhan makan dan minum bagi petugas.
 - Terlaksananya dapur umum.
- c. Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung jawab	Waktu
1	Menyiapkan kebutuhan personil dan peralatan dapur umum di setiap TPA / TPS.	Dinsos PPKB PPPA, PMI, Kodim	30 hari
2	Melaksanakan masak memasak di setiap TPS/TPA yang telah dihuni oleh pengungsi (menyiapkan makanan bagi pengungsi dan petugas)	Dinsos PPKB PPPA, PMI, Kodim	30 hari
3	Melaporkan setiap perkembangan Klaster ke posko Kabupaten	Dinsos PPKB PPPA	

d. Proyeksi Kebutuhan Klaster Dapur Umum

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil/ relawan	Orang	5100	80	Dinsos PPKB PPPA	1 TPS/TPA 10 orang ” kurang 492”	Dipenuhi dari pengungsi setempat
				60	Kodim		
				3	Didagsar, Koperasi & UMKM		
				2	Empat Sekawan		
				2	Kompag Merapi		
				2	ORARI		
				2	Senkom Polri		
				2	GRCC		
				2	Kompas		
				2	Pasag Merapi		
				2	Sigap Merapi		
				2	JME		
				2	KSB		
				2	Peduli Merapi		
				2	TAGAR		
				2	KLM		
				2	MDMC		
				2	RAPI		
				25	PMI		
				80	Tagana		
				50	LPBNU		
				30	Pramuka (Ubaloka)		
				4250	PKK (Lokasi TPS/TPA)		
				4608	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dapur Umum (Dengan BBM Gas)	Unit	170	1	Kodim	Kurang 161 unit	Dipenuhi dari bantuan Provinsi, Kab /Kota lain, PMI Kab lain.
				7	Dinsos PPKB		
				1	PPPA PMI		
				9	Jumlah		

7. Klaster Komunikasi dan Dokumentasi (Koordinator Dinas Komunikasi dan Informasi).

- a. Situasi
Terjadi peningkatan aktifitas gunung merapi dan pemaparan bencana gunung merapi.
- b. Sasaran
Sistim komunikasi dan informasi bencana berjalan baik dan tertata.

c. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1.	Menyiapkan kebutuhan personil dan peralatan komunikasi di posko desa lokasi bencana, Kecamatan dan posko TPS. Mengatur arus komunikasi agar teratur dan tidak terjadi kredit di tiap Kecamatan.	Diskominfo	30 hari 30 hari
2.	Melaporkan setiap perkembangan informasi tentang tanggap darurat bencana	Diskominfo, Dinsos PPKB PPPA	
3.	Mendirikan media center sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat secara terpadu dan komprehensif, riil dan update	Diskominfo	

d. Proyeksi Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil/ Relawan	Orang	426	10	Diskominfo	1 Dusun 1 Personil 1 Desa 2 Personil 1 TPA/TPS 1 Personil Posko Kab 10 Personil 1Kec. 4 Personil ” Sangat Cukup ”	Komuni- kator
				4	Bag. Humas		
				5	LPBNU		
				34	17 Kecamatan		
				30	RAPI		
				15	ORARI		
				64	Kompak Merapi		
				2	Polres		
				50	Kodim		
				35	Pasag Merapi		
				20	Peduli Merapi		
				5	BPBD		
				5	KOKAM		
				10	Senkom		
				20	Gema Bakti		
				75	Guruh merapi		
				20	GRCC		
				15	JME		
				10	Tagar		
				15	Lahara		
				170	Desa lokasi TPS		
				667	Jumlah		
2.	Antena Repeater	Buah	8	1	Kompak Merapi	”Sangat Cukup”	Komunikasi antar Klaster
				1	LPBNU		
				1	Peduli Merapi		
				1	RAPI		
				1	Kodim		
				2	Polres		
				1	Senkom		
				2	Pemda		
				1	Pasag Merapi		
				3	Forum Merapi		
				1	KOKAM		
				1	Kec. Salam		
				2	SAR		
				1	SSB		
				1	Gema Bakti		
				21	Diskominfo		
				38	Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Gardu Pemantau	Unit	12	5	Pasag Merapi	Kurang 3	Peman tauan
				1	Desa Kaliurang		
				2	BPPTKG		
				1	Ketep Pass		
				9	Jumlah		
4.	Handled VHF/UHF	Unit		15	ORARI		Komuni kasi
				12	Diskominfo		
				27	Jumlah		
5.	Handycam& Kamera video	Buah	4	1	BPBD	Cukup	Dokumen tasi
				2	Humas Protokol		
				2	Dinkes		
				1	Humas Protokol		
				6	Jumlah		
6.	Radio Komuni- kasi/HT	Buah	395	89	Desa	Cukup	
				12	Diskominfo		
				20	SENKOM		
				4	Humas Protokol		
				200	KODIM		
				2	Dinkes		
				9	Kecamatan		
				1	TPA		
				2	DPUPR		
				5	PMI		
				6	3 Kec.KRB III		
				5	LPBNU		
				10	BPBD / SAR		
				15	KOKAM		
				64	Kompak Merapi		
				35	Pasag Merapi		
				4	Relawan PKS		
				2	Relawan PDIP		
				20	Gema Bakti		
				20	Peduli Merapi		
				525	Jumlah		
	Pesawat RIG	Unit		3	3 Kecamatan		
				3	BPBD / SAR		
				21	Diskominfo		
	Pesawat RIG UHF	Unit		1	RAPI		
				1	Diskominfo		
	Pesawat RIG VHF	Unit		1	RAPI		
				1	Diskominfo		
				2	SENKOM		
				33	Jumlah		
7.	Kamera Digital	Buah		1(6)	BPBD		
				1	Diskominfo		
				4	Humas		
				6	Jumlah		
8.	Mobile HF	Unit		3	ORARI		
9.	Mobile VHF/UHF	Unit		25	ORARI		
10.	Teropong	Buah		1	BPBD		
11.	Radio Komunitas Swasta			1	Dukun		
12.	Radio Pemerintah (Gemilang)			1	RSPD/ Gemilang		
13.	Radio Penyiaran swasta			3	Merapi Indah Unima Fast FM		
14.	Faxcimili			2	Diskominfo		
				1	Dinkes		
				1	RSUD		
				1	BPBD		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	GPS	unit		1 2	BPBD DPU		
16.	Komputer/laptop	unit		10	Diskominfo		
17.	Koneksi Internet	MBPS		50	Diskominfo		
18.	Printer	unit		6	Diskominfo		
19.	Server			1	Diskominfo		
20.	Papan Data		170	2	Diskominfo		Kurang 168

8. Klaster Keamanan (Koordinator Polres)

a. Situasi :

Terjadi pengungsian dari 19 Desa radius 8 Km dari puncak erupsi Gunung Merapi menuju lokasi pengungsian. Desa-desa kosong dan rawan pencurian, terjadi kerawanan saat perjalanan evakuasi dan adanya kerawanan dilokasi pengungsian.

b. Sasaran :

- Terkendalnya keamanan di desa lokasi bencana / desa yang ditinggalkan pengungsi.
- Terkendalnya keamanan di perjalanan pengungsian sampai lokasi TPS
- Terkendalnya keamanan di lokasi TPS

c. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1.	Menyiapkan kebutuhan personil keamanan di lokasi desa yang ditinggalkan, mendampingi jalannya evakuasi pengungsi dan personil di lokasi pengungsian.	Polres, Kodim	30 hari
2.	Mengamankan desa yang ditinggal pengungsi, saat evakuasi pengungsi dan mengamankan lokasi pengungsian	Polres, Kodim	
3.	Memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat lokal maupun dari luar tentang daerah atau zona rawan agar tidak dilanggar	Polres	

d. Proyeksi kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personil / relawan	Orang	2.971	100	Kodim	” Cukup ”	
				2	empat sekawan		
				2	Kompag Merapi		
				2	ORARI		
				2	MDMC		
				2	GRCC		
				2	Kompas		
				2	RAPI		
				2	Sigap Merapi		
				2	JME		
				2	KSB		
				2	Peduli Merapi		
				2	TAGAR		
				2	KLM		
				720	Polres		
				2.032	Linmas		
				10	Satpol PP		
				30	Pasag Merapi		
				50	GP Anshor		
				75	Kokam		
				10	Senkom		
				10	LPBNU		
				5	Gema Bakti		
				3.068	Jumlah		
2.	Mobil Patroli	Unit	12	25	Polres	” Cukup ”	Patroli dan Pengawasan
				1	Kodim		
				2	Satpol PP		
				1	Dishub		
				29	Jumlah		
3.	Mobil Sedan	Unit	2	4	Polres	” Cukup ”	Pengawasan VIP
4.	Masker	Bh	2.275	0		Kurang 2275	
5.	Mantol	Bh	2.275	0		Kurang 2275	
6.	Senter	bh	2.275	0		Kurang 2275	
7.	Sepeda motor	unit	176	90	Polres	Cukup	
				200	KODIM		
				4	Satpol PP		
				294	Jumlah		

9. Klaster Pendidikan (Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

a. Situasi

Terjadi pengungsian penduduk dari 19 desa radius 8 Km dari puncak erupsi Gunung Merapi, seluruh guru SD/MI, SLTP dan SLTA serta seluruh murid turut mengungsi.

b. Sasaran

- Terlaksananya KBM di lokasi TPS, baik tingkat TK, SD/MI dan SLTP, Guru guru kelas atau mapel
- Tercukupinya kebutuhan sarpras KBM di lokasi TPS
- Adanya arena bermain dan arena olah raga bagi anak-anak beserta guru olah raga
- Adanya kegiatan pemulihan pertolongan pasca bencana.

c. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1.	Menyiapkan kebutuhan personil/ Guru, relawan dan peralatan KBM di Desa lokasi TPS. Identifikasi dan validasi kelompok belajar Penetapan tempat PBM/arena olahraga/bermain/ taman bacaan Menyiapkan motivator dan konselor.	Disdikbud/Kemenag/ Ponpes Disdikbud, Kemenag, Pemdes Disdikbud dan Pemdes	30 hari
2.	Melaksanakan kegiatan KBM bagi siswa TK, SD/MI dan SLTP di lokasi pengungsian dengan sistem sift (pagi, sore)	Disdikbud dan Kementerian Agama	
3.	Melaksanakan pembinaan mental bagi pengungsi	Disdikbud dan Kementerian Agama	
4.	Memfasilitasi terlaksanakan kegiatan olah raga dan permainan anak – anak di lokasi TPS	Disdikbud	
5.	Mendirikan taman bacaan beserta sarana dan prasarananya	Disdikbud, Pemdes, Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
6	Menyelenggarakan psycosisial	Dinkes , Pemdes	

d. Proyeksi kebutuhan Klaster Pendidikan

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gedung Sekolah (sistem bergantian dg siswa setempat)	Unit	170	70	SD/MI lokasi TPS	” Cukup ”	
2.	Kegiatan Belajar Mengajar	Keg.	170	70	SD/MI lokasi TPS	Cukup	
3.	Peralatan Sekolah (Buku Tulis, Pensil, Bolpoint, Penggaris, Penghapus, Tas)	Set		0	SD/MI Lokasi TPS	Kurang	
4.	Seragam Sekolah (SD)	Set		0		Kurang	
5.	Kendaraan/transportasi Sekolah	Unit	6	4	Setda	Kurang 2	
6	Perpustakaan dan taman bacaan Keliling	Unit	17	2	Perpus Daerah	“Kurang 15 “	
7.	Tenaga kependidikan dan Guru	SD/MI	170	45 170 187 357	SD/MI Desa yang ngungsi SD/MI Desa lokasi TPS Disdikbud Jumlah		

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Ustad/romo/ pastur (rohaniaean)	Orang	70	5	KODIM	Kurang 165	
9.	Sarana olah raga	Unit	70	0		Kurang 170	
10.	Sarana bermain anak (PAUD)	Unit	70	0		Kurang 170	
11	Tutor/pelatih bermain anak	Orang	10	0		1 TPS 5 orang Kurang 510	

10. Klaster Ekonomi (Koordinator Bagian Perekonomian Setda)

a. Situasi

Terjadinya pengungsian penduduk di 19 desa radius 8 Km dari puncak merapi, terhentinya sistem perekonomian masyarakat, tanaman rusak, industri rumah tangga terhenti, kehidupan pasar terhenti, rumput tertutup abu merapi, banyak ternak yang mati.

b. Sasaran

- Terlaksananya kegiatan pembinaan bidang ekonomi sebelum terjadinya bencana (saat waspada-siaga)
- Timbulnya kembali kegiatan ekonomi rumah tangga di lokasi TPS
- Terlaksananya kegiatan peningkatan ketrampilan di bidang ekonomi di lokasi TPS

c. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1.	Menyiapkan kebutuhan personil dan perlengkapannya di Klaster ekonomi	Bag. Perekonomian Pertanian, Peterikan, Disdagkop dan UKM.	30 hari
2.	Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang ekonomi sebelum terjadi bencana di 19 desa radius 8 km (saat waspada-siaga)	Pertanian, Peterikan, Disdagkop dan UKM	
3.	Memberikan pelatihan peningkatan ketrampilan bidang ekonomi	Pertanian, Peterikan, Bag. Perekonomian	
4.	Melaporkan perkembangan data masyarakat yang mempunyai kredit pada BUMD (kerjasama dengan pihak desa/kecamatan)	Bag. Perekonomian	
5.	Melakukan pengungsian ternak, pembelian ternak masyarakat oleh pemerintah/swasta/CSR, penggantian ternak untuk yang mati, bantuan pakan hijauan	Peterikan	
6.	Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	Disdagkop dan UKM	

d. Proyeksi kebutuhan Klaster Ekonomi

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Perse diaan	Lokasi	Keterangan atau rasio kecukupan	Fungsi
1.	Ternak besar (sapi, kerbau, kambing)	Ekor	Minimal 80 barak	43.246	Dekat barak pengungsian	-	Perlu barak komunal
2.	Ternak kecil (unggas, kelinci)	Ekor	Untuk konsumsi (dijual)	82.460	Dekat barak pengungsian		
3.	Perikanan	Kolam	Untuk konsumsi (dijual)	22.766 m ²			
4.	Pasar	Buah	Pasar sementara (di lokasi barak)	Srumbung 3, Dukun 2, Sawangan1 (Jumlah 6)		Ada omset dan pelaku serta apa yang dijual	
5.	UMKM dan IKM	Unit		2.098 UU 2.567 UU 2.066 UU	Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun Kecamatan Sawangan/ Disperin dagkop		
6	Lahan salak	Unit		2068 Ha			
7	Lahan sayur	Unit		1464 Ha			
	Padi	Unit		795 Ha			
	Jagung	Unit		663 Ha			
	Ubi-ubian	Unit		930 Ha			
8.	Industri RT	Unit RT		1.786 UU 685 UU 2.410 UU	Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun Kecamatan Sawangan/ Disperin dagkop		
9.	Perkebunan dan hutan rakyat (kelapa, kopi, kakao albasia, mahoni, akasia, suren, dll)			534.000 Ha (kelapa) 250 Ha (sengon)			
10.	Koperasi			30 1	Kodim		
11.	Penyuluhan bidang ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan			3	Bagian Perekonomian		

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT DAN PERMASALAHAN TERNAK

A. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal terpenting setelah penyusunan dokumen rencana kontingensi ini adalah:

1. memahami bagaimana rencana kontingensi dioperasionalkan menjadi rencana operasi;
2. memahami proses pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Komando Tanggap Darurat;
3. memahami proses penetapan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Komandan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Komando Tanggap Darurat; dan
4. memahami cara menyusun draft rencana operasi tanggap darurat.

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilakukan melalui pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan penunjukan Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Bupati. Komandan bertanggung jawab untuk menyusun rencana operasi berdasarkan rencana kontingensi dan masukan dari hasil kaji cepat. Pemahaman komprehensif terhadap isi dan materi dokumen rencana kontingensi menjadi hal penting agar seluruh pelaksanaan rencana operasi penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif dan efisien.

Guna memudahkan penyusunan rencana operasi maka dapat dilakukan simulasi dengan menggunakan dasar rencana kontingensi ini. Di dalam simulasi tersebut akan tergambar bagaimana Surat Keterangan Penetapan Darurat Bencana (SKPDB) dibentuk dan bagaimana Komandan ditunjuk serta bagaimana operasi penanganan darurat bencana berjalan. Catatan proses operasi penanganan darurat akan ditulis dan menjadi bahan perbaikan dokumen rencana kontingensi ini atau pedoman lain terkait dengan penanganan darurat bencana erupsi gunung Merapi.

Selanjutnya Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana di masing-masing sektor untuk membiayai hal-hal diluar perkiraan sebelumnya. Koordinasi secara berkala untuk memperbarui dokumen Rencana Kontingensi ini perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan termasuk pemutakhiran data ketersediaan sumber daya. Setiap masyarakat yang menjadi korban bencana mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan dan dibebaskan dari biaya pengobatan. Biaya operasional penanggulangan bencana pada saat penanganan darurat bencana menggunakan APBD Kabupaten Magelang. Jika dana tidak mencukupi, dimintakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya apabila belum dapat diatasi dapat mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB setelah ada pernyataan Darurat Bencana secara resmi dan tertulis dari Bupati.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan pada masa yang akan datang dengan melakukan kegiatan:

1. pendataan dan pemutakhiran data daerah rawan bencana setiap 2 tahun sekali;
2. mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana diutamakan pada masyarakat daerah rawan bencana;
3. mengembangkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan yang ada pada pusat pengendalian operasi (*crisis centre*);
4. melengkapi dan memperbaiki serta merawat peralatan bencana; dan
5. menyiapkan jalur evakuasi dan tanda-tanda/symbol daerah rawan bencana.

Dengan berbagai kegiatan di atas maka diharapkan rencana kontingensi ini akan terus mengalami pemutakhiran secara rutin dan berjangka waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

B. PERMASALAHAN TERNAK

Permasalahan ternak warga KRB III terdampak erupsi Erupsi Gunung Merapi masih menjadi perdebatan yang mengemuka. Pemerintah Daerah perlu menetapkan mekanisme penanganan darurat terhadap ternak terutama sapi yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Mekanisme yang direncanakan dalam dokumen rencana kontingensi ini masih membutuhkan solusi yang lebih praktis dan efisien. Berikut ini alternatif solusi terkait permasalahan ternak:

1. Alternatif 1

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembelian hewan ternak milik masyarakat yang terdampak erupsi bencana Gunung Merapi. Pembelian dan pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembelian hewan ternak oleh Pemerintah Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pembelian Hewan Ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim Fasilitasi Pembelian Hewan Ternak terdiri dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Perwakilan Organisasi Non Pemerintah. Tim tersebut bertugas memetakan pemilik dan jumlah hewan ternak, melakukan penaksiran harga ternak, melakukan evakuasi, mengobati, memelihara, dan mendistribusi hewan ternak kepada pemilik lama/kelompok lain atau memfasilitasi penjualan hewan ternak.

Penentuan harga pembelian hewan ternak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai hasil penaksiran harga Tim Fasilitasi Pembelian Hewan Ternak. Mekanisme pembelian hewan ternak oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau diatur oleh Tim Fasilitasi Pembelian Hewan Ternak.


Hewan ternak yang telah dibeli oleh Pemerintah Daerah dipelihara oleh Pemerintah Daerah sampai dengan keadaan aman. Dalam hal keadaan telah aman hewan ternak dapat dihibahkan kembali kepada pemilik lama, dihibahkan kepada kelompok lain atau dijual oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat hewan ternak yang mati sebelum dilakukan pembelian hewan ternak dilakukan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alternatif 2

Sebagian warga lainnya cenderung menitipkan ternak ke desa penyangga dengan mekanisme pengelolaan yang disepakati bersama antara desa terdampak dan desa penyangga. Desa penyangga mempersiapkan lahan dan kandang yang ditempatkan secara komunal (bersama) atau ke kandang milik penduduk di desa penyangga. Pilihan ini dianggap lebih realistis daripada dijual dengan harga murah dan jauh dari standar harga normal.

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kontingensi merupakan panduan atau acuan bagi pemangku kepentingan terkait baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun organisasi kemasyarakatan (LSM) nasional maupun internasional dalam melakukan operasi penanganan darurat bencana erupsi gunung Merapi. Sebagai sebuah dokumen yang berisi komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanganan darurat bencana harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Dokumen rencana kontingensi yang sudah disusun ini dapat dioperasionisasikan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana. Hal-hal yang belum tercantum dalam dokumen ini, dapat dijabarkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ED. WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN